

650.15  
SET  
a e f

**ANALISIS PERKEMBANGAN KINERJA KEUANGAN  
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) DIVISI  
TANAMAN TAHUNAN SEBELUM DAN SESUDAH MERGER**

**LAPORAN INTERNSHIP**

*Diajukan kepada Pengelola Program Studi Magister Manajemen  
Universitas Diponegoro  
Untuk memenuhi sebagian syarat guna  
Memperoleh derajat sarjana S - 2 Magister Manajemen*



Diajukan oleh :

Nama : Ari Respati Setyaningrum

NIM : C 4A 098012

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
TAHUN 2000**

Laporan Internship berjudul

**ANALISIS PERKEMBANGAN KINERJA KEUANGAN  
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) DIVISI  
TANAMAN TAHUNAN SEBELUM DAN SESUDAH MERGER**

yang dipersiapkan dan disusun oleh :  
**Ari Respati Setyaningrum**  
telah dipertahankan didepan Dewan Penguji pada tanggal 6 Juli 2000  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

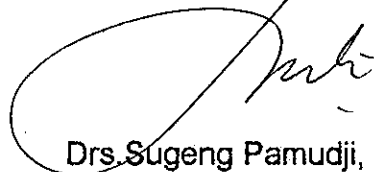
Susunan Dewan Penguji

Pembimbing / Ketua Penguji



Drs. M. Nasir, MSi, Akt

Dewan Penguji



Drs. Sugeng Pamudji, Msi, Akt

Semarang, Juli 2000  
Universitas Diponegoro  
Program Pascasarjana  
Program Studi Magister Manajemen



Program



Prof. Dr. Suyudi Mangunwiharjo

## MOTTO

*"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan"*

*(2. S. Alam Nasipah : 6)*

*"Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri".*

*(2. S. Ar Ra'd : 11)*

## RINGKASAN

Gebrakan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara yang telah dilakukan beberapa tahun silam bertujuan agar BUMN sebagai salah satu pelaku perekonomian di Indonesia, mampu bersaing di era globalisasi sesuai dengan mekanisme pasar. Restrukturisasi BUMN pertanian sub sektor perkebunan telah menghasilkan 14 PT. Perkebunan Nusantara melalui penggabungan usaha (merger) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 6-19 Tahun 1996. Salah satu PT. Perkebunan Nusantara hasil merger adalah PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) yang merupakan penggabungan dari PT. Perkebunan XVIII (Persero) dengan PT. Perkebunan XV-XVI (Persero), dalam perkembangannya terbagi menjadi Divisi Tanaman Tahunan dan Divisi Tanaman Semusim. Dengan adanya merger, secara konsolidasi PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena harus ikut menanggung beban kerugian yang ditanggung oleh PT. Perkebunan (PTP) induk. Untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan serta mengevaluasi apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan sebelum dan sesudah melakukan merger, maka telah dilakukan penelitian mengenai : "Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan Sebelum dan Sesudah Merger".

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan selama tahun 1992-1999 yang dilengkapi dengan data primer hasil wawancara dengan pihak perusahaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif yang bertujuan menggambarkan keadaan obyek penelitian atau hal-hal yang berhubungan dengan obyek tersebut. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan serta analisis statistik *t-test* pada tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) = 5 % dan 10 %. Analisis rasio yang digunakan meliputi *Debt Equity Ratio*, *Cash Ratio*, *Net Working Capital to Total Asset*, *Inventory Turn Over*, *Total Asset Turnover*, *Collection Period*, *Return On Equity (ROE)*, *Return On Asset (ROA)* dan *Net Profit Margin*. Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan nyata antara *Debt Equity Ratio*, *Net Working Capital to Total Asset*, *ROE*, *ROA* dan *Net Profit Margin* sebelum dan sesudah merger. Sedang untuk *Cash Ratio*, *Inventory Turn Over*, *Total Asset Turnover* dan *Collection Period* tidak terdapat perbedaan nyata.

Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penggabungan (merger), PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan memiliki kinerja keuangan yang semakin baik namun belum mampu menciptakan sinergi melalui peningkatan efisiensi dalam kegiatan operasional maupun pencapaian skala ekonomis. Oleh karena itu dalam mengambil langkah kebijakan, sebaiknya pemerintah tidak hanya menekankan pada peningkatan laba tetapi juga mengarah pada tujuan merger yang sebenarnya.

## ABSTRACT

The aim of the restructuring of state committee, which has been conducted a few years ago is that state committee as one of the economics performers in Indonesia should be able to compete in era globalization conform to market mechanism. The plantation sub-sector of agriculture state committee restructuring has produced 14 PT. Perkebunan Nusantara by bussiness merger, which is ruled within Governmental Regulation No. 6-19, 1996. One of the merger results is PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero), which is the merger between PT. Perkebunan XVIII (Persero) and PT. Perkebunan XV-XVI (Persero). In the subsequent development, it is divided into the Annual Plants Division and the Season Plants Division. The presence of merger causes the Annual Plants Division is in less unprofitable position for it also should bear the loss of the Season Plants Division. In order to understand the development of finance activity and evaluate as well whether there is finance activity differences PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) of the Annual Plants Division before and after the merger. Therefore it is carried out a research about : "*The Analysis of Finance Activity Development of PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) of the Annual Plants Division before and after the merger*".

The used data within this research is secondary data in the form of finance report of PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) of the Annual Plants Division for 1992-1999, which is completed by primary data as the result of interview with the object. Data analysis is carried out by using finance ratio and statistics analysis (*t-test*) of significant level ( $\alpha$ ) = 5% and 10%. The used ratio analysis comprise Debt Equity Ratio, Cash Ratio, Net Working to Total Assets, Inventory Turn Over, Total Asset Turn Over, Collection Period, Return On Equity, Return On Asset and Net Profit Margin. The result of analysis can be found that there is actual difference of Debt Equity Ratio, Net Working Capital to Total Asset, ROE, ROA and Net Profit Margin about before and after the merger. Whereas, Cash Ratio, Inventory Turn Over, Total Asset Turnover and Collection Period can't be found the actual difference.

The result of the analysis can be concluded that the presence of the PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) of the Annual Plants Division has finance activity, which becomes better than before, but can't afford to increase the efficiency of operational activity and the achievement of economics scale as well. Therefore, in taking the wisdom step. It is better for the government not to emphasize the increase of benefit only but also direct the aim of true merger.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan internship ini dengan judul *"Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan Sebelum dan Sesudah Merger"*.

Penyusunan laporan internship ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh derajat sarjana S-2 Program Studi Magister Manajemen pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam menyelesaikan penyusunan laporan internship ini penulis telah banyak menerima bantuan yang sangat berharga baik dalam bentuk bimbingan, informasi, dorongan moril maupun materil sehingga laporan internship ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Suyudi Mangunwiharjo selaku Direktur Program Studi Magister Manajemen Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Dr. Augusty T. Ferdinand, MBA selaku Deputy Direktur Bidang Akademik Program Studi Magister Manajemen Universitas Diponegoro Semarang
3. Bapak Drs. M. Nasir, Msi, Akt. selaku dosen pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga terselesaikannya laporan internship ini.
4. Bapak Ir. A.T. Tiwow selaku Direktur Sumber Daya Manusia/Umum PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan yang telah berkenan memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan.
5. Bapak Arif Badawi selaku staf Sumber Daya Manusia dan Personalia PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan yang telah banyak membantu penulis demi kelancaran pelaksanaan penelitian.

6. Bapak Pardini HU selaku Kepala Urusan Akuntansi/Verifikasi dan Agendaris PT. Perkebunan Nusantara IX (persero) Divisi Tanaman Tahunan beserta staf yang telah meluangkan waktu untuk membantu dalam pengumpulan data dan informasi yang diperlukan penulis selama melaksanakan penelitian.
7. Kakak-kakakku, terutama Ayah dan Ibu, yang senantiasa memberikan dorongan, semangat dan doa-doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan internship ini.
8. Teman-teman Angkatan IX / Pagi khususnya Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Program Studi Magister Manajemen Universitas Diponegoro Semarang.
9. Sahabat - sahabatku yang telah memberikan semangat, Roos yang selalu menemani penulis dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung hingga terselesaikannya penyusunan laporan internship ini.

Selanjutnya penulis sadar bahwa dalam laporan internship ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, segenap saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan laporan internship ini.

Harapan penulis, semoga laporan internship ini dapat bermanfaat dan merupakan sumbangan pemikiran bagi pembaca dan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amien.

Semarang, Juli 2000

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Motto.....	iii
Ringkasan.....	iv
Abstract.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Lampiran.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	7
1.3. Pembatasan Masalah.....	9
1.4. Tujuan dan Kegunaan.....	10
1.5. Metodologi Penelitian.....	10
1.5.1. Jenis Data .....	10
1.5.2. Metode Pengumpulan Data.....	11
1.5.3. Teknik Analisis.....	11
1.6. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TELAAH PUSTAKA.....	18
2.1. Tujuan Laporan Keuangan.....	18
2.2. Analisis Rasio Keuangan.....	20
2.2.1. Rasio Keuntungan (Profitabilitas).....	20
2.2.2. Rasio Aktivitas (Efisiensi).....	21
2.2.3. Rasio Pengungkit Hutang (Leverage).....	22



2.2.4. Rasio Likuiditas.....	23
2.3. Laporan Keuangan Konsolidasi.....	26
2.4. Merger (Penggabungan Usaha).....	27
2.5. Alasan-Alasan dan Tujuan Merger.....	31
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	36
3.1. Latar Belakang Pendirian Perusahaan.....	36
3.2. Struktur Organisasi Perusahaan.....	39
3.3. Ruang Lingkup Kegiatan Usaha.....	42
3.4. Bidang Usaha.....	42
3.5. Wilayah Kerja.....	43
3.5.1. Wilayah Kerja Sebelum Melakukan Merger.....	43
3.5.2. Wilayah Kerja Sesudah Melakukan Merger.....	44
BAB IV ANALISIS DATA.....	48
4.1. Rasio Pengungkit Hutang (Leverage).....	48
4.2. Rasio Likuiditas.....	51
4.3. Rasio Aktivitas (Efisiensi).....	55
4.4. Rasio Keuntungan (Profitabilitas).....	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
5.1. Kesimpulan.....	69
5.2. Saran-saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Tingkat Kesehatan BUMN selama 1994-1996.....	2
1.2. Tingkat Kesehatan BUMN selama 1997-1998.....	2
3.1. Hasil Penjualan Komoditi PT. Perkebunan XVIII (Persero) Tahun 1995	43
3.2. Areal Tanaman PT.Perkebunan XVIII (Persero) Tahun 1995.....	45
3.3. Kebun Tanaman Tahunan PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan.....	46
4.1. Hasil Uji <i>t-Test</i> seluruh rasio keuangan.....	48
4.2. Perhitungan <i>Debt Equity Ratio</i> PT.Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan sebelum dan sesudah merger.....	50
4.3. Perhitungan <i>Cash Ratio</i> PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan sebelum dan sesudah merger.....	52
4.4. Perhitungan <i>Net Working Capital to Total Asset</i> PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan sebelum dan sesudah merger.....	54
4.5. Perhitungan <i>Inventory Turn Over</i> PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan sebelum dan sesudah merger...	57
4.6. Perhitungan <i>Total Asset Turnover</i> PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan sebelum dan sesudah merger...	58
4.7. Perhitungan <i>Collection Period</i> PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan sebelum dan sesudah merger...	60
4.8. Perhitungan <i>Return On Equity</i> PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan sebelum dan sesudah merger...	62
4.9. Perhitungan <i>Return On Asset</i> PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan sebelum dan sesudah merger...	64
4.10. Perhitungan <i>Net Profit Margin</i> PT.Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan sebelum dan sesudah merger.....	67

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan.....	19

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Struktur Organisasi PT. Perkebunan Nusantara IX  
(Persero) Divisi Tanaman Tahunan
- Lampiran 2. Laporan Keuangan PT. Perkebunan Nusantara IX  
(Persero) Divisi Tanaman Tahunan tahun 1992 sampai  
dengan tahun 1999
- Lampiran 3. Hasil Uji *t-Test*
- Lampiran 4. Tabel t
- Lampiran 5. Surat Keterangan Penelitian

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang masalah

Perubahan-perubahan yang terjadi seiring dengan perkembangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seringkali melahirkan berbagai kebijakan-kebijakan baru seperti adanya kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang menjadikan iklim usaha semakin kompetitif, tidak terkecuali Badan Usaha Milik Negara sebagai salah satu pelaku dalam perekonomian Indonesia merasakan dampak dari kebijaksanaan tersebut. Pangsa pasar dari produk-produk BUMN yang selama ini dikuasai, praktis telah dimasuki oleh pelaku ekonomi lainnya. Keadaan inilah yang mendorong pemerintah selaku pemilik badan usaha tersebut untuk meningkatkan efisiensi serta produktivitasnya agar mampu bersaing sesuai dengan mekanisme pasar.

Berbagai upaya dalam rangka pembenahan BUMN telah dilakukan sejak beberapa tahun silam, namun gebrakan restrukturisasi dimulai sejak dikeluarkannya Inpres no. 5 Tahun 1988 yang dijabarkan dalam SK Menkeu RI No. 740/KMK.00/1989 tentang Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas BUMN.

Sebenarnya sasaran dari pembenahan kondisi ini adalah untuk meningkatkan tingkat kesehatan perusahaan yang lebih baik, namun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi, baik yang menyangkut aspek finansial maupun manajemen. Aspek finansial ini bervariasi mulai dari kesulitan likuiditas sampai dengan kesulitan solvabilitas (Mustaruddin, 1992). Tabel berikut menggambarkan kondisi tingkat kesehatan BUMN selama 1994 - 1996.

UPT-POSTAL-INDO

Tabel 1.1.1. Tingkat Kesehatan BUMN selama 1994-1996

Tingkat Kesehatan	1994		1995		1996	
	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%
Sehat Sekali	52	28.4	47	26.4	42	25.3
Sehat	33	18.0	37	20.8	39	23.5
Kurang Sehat	35	19.1	31	17.4	28	16.9
Tidak Sehat	63	34.4	63	35.4	57	34.3
Total	183	100.0	178	100.0	166	100.0

Sumber : Kompas, 23-4-1998

Tabel 1.1.1. menunjukkan bahwa terjadi penurunan tingkat kesehatan BUMN dalam katagori sehat sekali selama tahun 1995 dan 1996. Begitu pula untuk katagori kurang sehat dan tidak sehat. Sebaliknya, jumlah total BUMN yang berada dalam kondisi sehat mengalami peningkatan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa selama periode ini perekonomian kita belum terlanda krisis moneter sehingga besar kemungkinan masih banyak lagi BUMN yang mengalami penurunan kinerja pada saat terjadinya krisis. Disamping itu, penurunan jumlah total BUMN tersebut banyak disebabkan oleh adanya merger dan biasanya dilakukan terhadap BUMN dalam katagori kurang sehat dan tidak sehat. Hal ini dapat ditunjukkan pada tabel 1.1.2 tentang kondisi BUMN selama periode 1997 - 1998, tidak termasuk BUMN Bank, PLN dan BUMN minorital.

Tabel 1.1.2. Tingkat Kesehatan BUMN selama 1997-1998

Tingkat Kesehatan	1997		1998	
	$\Sigma$	%	$\Sigma$	%
Sehat Sekali + Sehat	82	59.8	87	68.0
Kurang Sehat	9	6.6	23	18.0
Tidak Sehat	46	33.6	18	14.0
Total	137	100.0	128	100.0

Sumber : Usahawan No. 06 TH XXVIII Juni 1999

Didalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1988 tanggal 28 Oktober 1988 tentang konsep penyehatan BUMN antara lain menyebutkan : *pertama*, untuk

BUMN yang tergolong sehat atau sehat sekali apabila ingin dikembangkan lebih lanjut dapat menempuh cara (a) melakukan konsolidasi, (b) melakukan penggabungan, (c) memasyarakatkan saham melalui go publik, (d) menerima penyertaan langsung, (e) melakukan kerjasama operasi, (f) membentuk perusahaan patungan. *Kedua*, bagi BUMN yang tergolong kurang sehat dapat dilakukan penataan kembali dengan cara yaitu : (a) melakukan restrukturisasi permodalan, (b) melakukan penyederhanaan struktur organisasi, (c) melakukan penggabungan antara BUMN maupun dengan swasta, (d) memecah perusahaan menjadi beberapa BUMN, (e) mengikutsertakan partisipasi masyarakat melalui penyertaan langsung, (f) melakukan kontrak manajemen. *Ketiga*, khusus BUMN yang tidak sehat dapat ditempuh cara-cara sebagai berikut : (a) dilakukan penyehatan BUMN sebagaimana yang telah dimaksud sebelumnya, (b) dijual, atau (c) dilikuidasi.

Upaya-upaya pembenahan yang dilakukan tidak hanya menyangkut aset negara yang nilainya sangat besar, tetapi juga kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja, sebagai agen pembangunan dan fungsi komersialnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan BUMN No. 215/M-BUMN/1999, penggolongan BUMN terbagi atas empat jenis industri yakni BUMN jenis industri dasar dan pengolahan sumber daya alam, jenis industri manufaktur, jenis industri perdagangan dan jasa lain serta jenis industri jasa keuangan. Yang termasuk dalam kelompok industri dasar dan pengolahan sumber daya alam antara lain industri pertambangan, industri perkebunan, pertanian, kehutanan dan perikanan, serta industri kimia dasar.

PT. Perkebunan merupakan Badan Usaha Milik Negara non infrastruktur kelompok perkebunan yang berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero), yaitu BUMN yang bergerak dalam usaha berbagai komoditi perkebunan seperti perkebunan kelapa sawit, karet, teh, kopi, kakao dan sebagainya.

PT. Perkebunan ini memiliki skala industri luas, organisasi besar, lahan dan spesifikasi komoditi yang luas dan terpencar, serta kekhususan kondisi sosiokultural sehingga dituntut untuk membantu dalam usaha peningkatan pendapatan nasional.

Pada dasarnya skala industri yang besar diperlukan untuk mendapatkan tingkat pendapatan yang tinggi guna mengimbangi besarnya investasi pada perkebunan, sehingga semakin besar skala industri perusahaan akan semakin meningkatkan rentabilitas perusahaan. Dengan banyaknya kebun-kebun yang dimiliki dan terpencar, masing-masing membutuhkan pengelolaan dan pengawasan tersendiri. Unit usaha yang banyak ini akan memerlukan skala organisasi yang besar sehingga manajemen dituntut untuk mampu mengkoordinasikannya untuk mencapai misi dan tujuan perusahaan.

Spesifikasi komoditi berdampak perlunya penguasaan pengetahuan budidaya komoditi perkebunan yang baik agar manajemen mampu menerapkan perlakuan yang tepat untuk masing-masing komoditi dalam rangka meningkatkan tingkat produktivitas yang tinggi. Disamping itu dengan terpencarnya komoditi tersebut membutuhkan rentang kendali yang besar sehingga diperlukan suatu pengawasan yang ketat untuk mencapai efektivitas dan efisiensi produksi yang diharapkan.

Sebagaimana layaknya BUMN lainnya, selain menyangkut kepemilikannya oleh negara, PT. Perkebunan berfungsi sosial sebagai *agent of development*



sekaligus mengemban peran sebagai *business entity* untuk melaksanakan fungsi komersialnya. Misi sebagai *agent of development* memiliki peran untuk mengubah struktur usaha pertanian masyarakat kepada corak usaha tani komersial yang terpadu dengan skala usaha yang besar serta mengembangkan struktur ekonomi nasional dengan mendorong berkembangnya usaha koperasi dan swasta kecil yang masih lemah. Peran itu diwujudkan melalui pengembangan sistem Perkebunan Inti Rakyat (PIR), bantuan modal serta bimbingan usaha melalui penyisihan sebagian keuntungan yang diperoleh kepada usaha kecil dan koperasi.

Restrukturisasi BUMN Pertanian Sub Sektor Perkebunan telah dilakukan melalui merger dari yang semula berjumlah 32 menjadi 14 PT. Perkebunan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 - 19 Tahun 1996, disertai adanya penambahan penyertaan modal negara dan pendirian dengan nama baru yaitu PT. Perkebunan Nusantara (Persero). Alasan-alasan yang dikemukakan dari langkah restrukturisasi tersebut antara lain karena terdapat beberapa kesenjangan antar PT. Perkebunan yang ada dalam hal skala usaha dengan luas yang berbeda, penggunaan teknologi serta penyebaran wilayah operasi/kerja yang tidak merata serta kondisi keuangan yang bervariasi (Rilda Murniati, 1998).

Menurut Direktorat Perusahaan Pertanian dan Kehutanan, Departemen Keuangan 1995, prinsip-prinsip dasar dalam restrukturisasi BUMN pertanian :

1. Skala ekonomis luasan areal tanaman antara 80.000 Ha sampai 120.000 Ha.
2. Komposisi komoditi diusahakan tidak melebihi tiga jenis komoditi utama.
3. Rentang kendali masih dalam jangkauan manajemen.

4. Menghindari adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta tidak mengurangi penghasilan karyawan.
5. Wilayah kerja berdasarkan geografi dan propinsi yang berdekatan.
6. Organisasi dan manajemen dilakukan secara profesional.
7. Lingkup kegiatan usaha dengan *core bussiness*.
8. Dalam upaya penyehatan dengan menggunakan kemampuan PT. Perkebunan itu sendiri atau antar PT. Perkebunan.
9. Bantuan atau perlakuan pemerintah merupakan upaya penyehatan terakhir.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Pemantapan misi BUMN pertanian sebagai dinamisator pembangunan dan modernisasi sektor pertanian.
2. Skala usaha dan konsolidasi wilayah kerja untuk memungkinkan dikembangkannya penguasaan yang efisien
3. Komposisi usaha yang menjamin ketahanan terhadap gejolak pasar
4. Mampu mengembangkan usaha yang terintegrasi
5. Sehat secara finansial.

Ditegaskan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 740/KMK.00/1989 bahwa konsolidasi (pelebunan usaha) atau merger (penggabungan usaha) dilakukan untuk meningkatkan modal usaha, memperluas pangsa pasar serta meningkatkan daya saing. Untuk itu perlu dilakukan restrukturisasi terhadap status hukum, struktur organisasi dan kepemilikan saham.

Langkah penggabungan yang telah dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara

Pertanian Sub Sektor Perkebunan merupakan salah satu langkah untuk memantapkan peranannya dalam pembangunan nasional serta langkah antisipasi dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan berat pada masa yang akan datang. Hasil penggabungan dilakukan melalui proses yang sudah berlangsung cukup lama sejak tahun 1993 dan baru selesai pada tahun 1996 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tentang penggabungan BUMN Pertanian Sub Sektor Perkebunan.

Menteri Pertanian saat itu, Syarifudin Baharsjah mengatakan bahwa penggabungan usaha BUMN pertanian dilaksanakan bukan karena kegagalan, melainkan suatu usaha untuk memantapkan peran BUMN pertanian dalam mengantisipasi tantangan yang berat dan kompleks pada masa yang akan datang (Warta Pertanian, 1994). Dengan demikian BUMN pertanian diharapkan dapat memainkan peranannya sebagai pelaku ekonomi dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap II di tengah-tengah kancah perekonomian yang ditandai oleh era globalisasi dengan persaingan pasar yang semakin ketat.

Dengan pendirian PT. Perkebunan Nusantara diharapkan dapat meningkatkan kinerja usaha perkebunan dan pengembangan usaha secara efisien meliputi wilayah kerja, skala usaha, kualitas manajemen serta sumber daya manusia guna pencapaian kinerja yang optimal.

## **1.2. Perumusan masalah**

Salah satu PT. Perkebunan Nusantara hasil merger adalah PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) merupakan hasil penggabungan antara PT. Perkebunan

XVIII (Persero) dibidang tanaman tahunan, dengan PT. Perkebunan XV-XVI (Persero) yang bergerak dibidang tanaman gula dan tetes berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996, dengan Akta Pendirian Nomor 42 tanggal 11 Maret 1966. Dalam perkembangannya, PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) terbagi menjadi dua divisi yaitu Divisi Tanaman Tahunan dan Divisi Tanaman Semusim.

Dengan adanya merger, kinerja keuangan PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan sebenarnya masih dalam kondisi yang mendatangkan laba tetapi secara konsolidasi justru berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena harus ikut menanggung beban kerugian yang diderita oleh Divisi Tanaman Semusim.

**Tabel 1.3. Laporan Rugi Laba Konsolidasi PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Tahun 1996-1999**

Tahun	Divisi Tanaman Tahunan	Divisi Tanaman Semusim	Jumlah
1996	Rp. 12.102.586.612	(Rp. 10.717.172.074)	Rp. 1.385.414.538
1997	Rp. 12.987.112.669	(Rp. 21.824.812.062)	(Rp. 8.837.099.393)
1998	Rp. 65.530.084.852	Rp. 17.568.736.562	Rp. 83.098.812.414
1999	Rp. 21.927.284.580	(Rp. 21.463.606.200)	Rp. 464.278.380

Sumber : Data sekunder yang diolah

Peningkatan laba sebesar Rp 83.098.812.414 pada tahun 1998 disebabkan realisasi harga jual rata-rata ekspor dan lokal untuk keseluruhan komoditi diatas anggaran yang ditetapkan. Kondisi ini terjadi karena melemahnya nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar pada saat itu serta adanya perubahan tata niaga gula. Untuk tahun berikutnya (tahun 1999) kembali terjadi penurunan laba yang cukup tajam.

Kinerja yang cenderung terus menurun dapat membawa perusahaan akan sampai pada titik dimana perusahaan tidak akan mampu lagi untuk mempertahankan

kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu pihak manajemen perusahaan perlu untuk mengevaluasi :

1. Apakah terdapat perbedaan tingkat kinerja keuangan PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan saat sebelum dan sesudah melakukan merger?
2. Bagaimana perkembangan kinerja keuangan PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan selama tahun 1992-1999 ?

### 1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan maka penulis perlu melakukan pembatasan penelitian yaitu :

- a. Objek penelitian adalah PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan.
- b. Variabel - variabel yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan adalah :
  - Rasio leverage : *Debt Equity Ratio*
  - Rasio likuiditas : *Cash Ratio, Net Working Capital to Total Asset*
  - Rasio Aktivitas : *Inventory Turn Over, Collection Period, Total Asset Turn Over*
  - Rasio Profitabilitas : *Return On Equity, Return On Asset, Net Profit Margin*
- c. Periode penelitian dilakukan selama periode pembukuan yang berakhir tanggal 31 Desember dari tahun 1992 sampai dengan tahun 1999.

## **1.4. Tujuan dan kegunaan penelitian**

### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perkembangan kinerja keuangan PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan selama periode tahun 1992 - 1999 serta mengevaluasi apakah ada perbedaan tingkat kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah melakukan merger.

### **1.4.2. Kegunaan Penelitian**

- a. Bagi perusahaan, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam menyusun kebijakan perusahaan khususnya yang menyangkut aspek - aspek perbaikan kinerja keuangan.
- b. Bagi penulis, sebagai sarana dan media untuk menambah pengetahuan secara praktis tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan studi ilmiah yang telah dipelajari dan diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah referensi untuk penelitian berikutnya.
- c. Bagi akademik, sebagai media untuk menerapkan pengetahuan serta menambah bahan literatur perpustakaan.

## **1.5. Metodologi Penelitian**

### **1.5.1. Jenis data**

#### **a. Data Primer**

Data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, yaitu berupa data hasil wawancara tentang gambaran umum perusahaan.

#### b. Data Sekunder

Data yang terlebih dulu telah dikumpulkan oleh orang lain atau data yang diperoleh dalam bentuk publikasi, yaitu berupa Laporan Keuangan Pokok PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan tahun 1992 sampai dengan tahun 1999. Selain itu juga dilakukan studi pustaka yaitu penelitian dengan menggunakan literatur-literatur yang sudah ada sebagai bahan referensi yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian.

### 1.5.2. Metode pengumpulan data

- a. Metode survey, dengan melakukan wawancara (*interview*) yaitu metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan pihak perusahaan.
- b. Metode observasi yaitu pengumpulan data melalui pengamatan langsung tentang perusahaan atau obyek yang sedang diteliti.
- c. Metode dokumentasi yaitu pencatatan data-data sekunder yang diperlukan dalam kaitannya dengan penelitian.

### 1.5.3. Teknik analisis

Dengan menggunakan laporan keuangan dalam beberapa periode pembukuan (1992 - 1999), maka teknik analisis yang digunakan :

#### 1.5.3.1. *Univariate Ratio Analysis*

Merupakan analisis rasio keuangan yang menggunakan satu variate dalam melakukan analisis.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan BUMN Republik Indonesia Nomor KEP-215/M-BUMN/1999 tentang Penilaian Tingkat Kinerja BUMN, indikator-indikator yang dipakai dalam penilaian kinerja keuangan dikelompokkan ke dalam empat rasio yaitu rasio leverage, rasio likuiditas, rasio aktivitas serta rasio keuntungan.

a. Rasio Pengungkit Hutang (Leverage)

Finansial leverage suatu perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban jangka panjangnya. Termasuk dalam kelompok rasio leverage adalah :

$$\text{Debt Equity Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Ekuitas Pemegang Saham}}$$

b. Rasio Likuiditas

Likuiditas perusahaan menunjukkan kemampuan untuk membayar kewajiban finansial jangka pendek yang jatuh tempo. Yang termasuk dalam rasio ini :

$$\text{Cash ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank} + \text{Surat Berharga}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

$$\text{Net Working Capital to Total Assets} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Kewajiban Lancar}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

c. Rasio Aktivitas

Menunjukkan kemampuan serta efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan aset-aset yang dimilikinya, disebut juga *asset activity ratios* atau *turnover ratios*. Terdiri atas :



$$\begin{aligned}
 \text{Inventory Turn Over} &= \frac{\text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Persediaan rata-rata}} \quad (\dots\text{kali}) \\
 \text{Total Assets Turnover} &= \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Total Aktiva rata-rata}} \quad (\dots\text{kali}) \\
 \text{Collection Period} &= \frac{\text{Piutang}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 365 \quad (\dots\text{hari})
 \end{aligned}$$

d. Rasio Keuntungan (Profitabilitas)

Mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba baik dalam hubungannya dengan penjualan, asset maupun laba bagi modal sendiri, dilihat dari :

$$\begin{aligned}
 \text{Return On Equity} &= \frac{\text{Laba Bersih setelah Pajak}}{\text{Ekuitas Pemegang Saham}} \times 100\% \\
 \text{Return On Assets} &= \frac{\text{Laba Bersih setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva rata-rata}} \times 100\% \\
 \text{Net Profit Margin} &= \frac{\text{Laba Bersih setelah Pajak}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%
 \end{aligned}$$

Langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi suatu seri data laporan keuangan dari perusahaan dalam jangka waktu periode tertentu. Proses analisis ini dilakukan dengan mengkalkulasi kenaikan/penurunan setiap item dari laporan keuangan dibandingkan dengan periode sebelumnya yang dijadikan sebagai dasar perbandingan.

### 1.5.3.2. Analisis Statistik

Untuk menguji hipotesis digunakan analisis uji beda (Spiegel, 1994) :

$$S_{x_1-x_2} = \sqrt{(N_1 - 1)S_1^2 + (N_2 - 1)S_2^2 / N_1 + N_2 - 2} \quad (1/N_1 + 1/N_2)$$

Keterangan :

t	= distribusi nilai t	N1	= jumlah sampel X1
X1	= rata-rata nilai X1	N2	= jumlah sampel X2
X2	= rata-rata nilai X2	S	= deviasi standar

Kemudian untuk mencari nilai t sampel :

$$t_{hit} = \frac{x_1 - x_2}{S_{x_1-x_2}}$$

Hipotesis yang akan diuji adalah :

a. Rasio Hutang terhadap Ekuitas (*Debt Equity Ratio*)

H0 : U1 = U2 (tidak terdapat perbedaan antara *debt equity ratio* sebelum dan sesudah merger)

H1 : U1 > U2 (*debt equity ratio* sebelum merger lebih tinggi daripada sesudah merger)

b. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

H0 : U1 = U2 (tidak terdapat perbedaan antara *cash ratio* sebelum dan sesudah merger)

H1 : U1 < U2 (*cash ratio* sebelum merger lebih rendah daripada sesudah merger)

c. Rasio Modal Kerja terhadap Total Aktiva (*Net Working Capital to Total Assets*)

H0 :  $U1 = U2$  (tidak terdapat perbedaan antara *net working capital to total asset* sebelum dan sesudah merger)

H1 :  $U1 < U2$  (*net working capital to total asset* sebelum merger lebih rendah daripada sesudah merger)

d. Perputaran Persediaan (*Inventory Turn Over*)

H0 :  $U1 = U2$  (tidak terdapat perbedaan antara *inventory turnover* sebelum dan sesudah merger)

H1 :  $U1 < U2$  (*inventory turn over* sebelum merger lebih rendah daripada sesudah merger)

e. Perputaran Total Aktiva (*Total Asset Turnover*)

H0 :  $U1 = U2$  (tidak terdapat perbedaan antara *total asset turnover* sebelum dan sesudah merger)

H1 :  $U1 < U2$  (*total asset turnover* sebelum merger lebih rendah daripada sesudah merger)

f. Periode Pengumpulan Piutang (*Collection Period*)

H0 :  $U1 = U2$  (tidak terdapat perbedaan antara *collection period* sebelum dan sesudah merger)

H1 :  $U1 > U2$  (*collection period* sebelum merger lebih tinggi daripada sesudah merger)

g. Return On Equity (ROE)

H0 :  $U1 = U2$  (tidak terdapat perbedaan antara *return on equity* sebelum dan sesudah merger)

H1 :  $U1 < U2$  (*return on equity* sebelum merger lebih rendah daripada sesudah merger)

h. *Return On Assets (ROA)*

H0 :  $U1 = U2$  (tidak terdapat perbedaan antara *return on asset* sebelum dan sesudah merger)

H1 :  $U1 < U2$  (*return on assets* sebelum merger lebih rendah daripada sesudah merger)

i. *Marjin Laba Bersih (Net Profit Margin)*

H0 :  $U1 = U2$  (tidak terdapat perbedaan antara *net profit margin* sebelum dan sesudah merger)

H1 :  $U1 < U2$  (*net profit margin* sebelum merger lebih rendah daripada sesudah merger)

## 1.6. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan merupakan rangkuman dari isi laporan internship yang dibuat untuk memberikan gambaran mengenai hal-hal yang akan diuraikan.

### 1. Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

### 2. Telaah Pustaka

Pada bab ini diuraikan tentang hal-hal yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diajukan, yang didalamnya memuat teori-teori mengenai

tujuan dan manfaat laporan keuangan, pengertian merger, alasan dan tujuan perusahaan dalam melakukan merger.

### 3. Gambaran Umum Perusahaan

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang perusahaan, struktur organisasi, serta kegiatan usaha PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan.

### 4. Analisis Data

Dalam bab ini diuraikan tentang hasil perhitungan data dengan menggunakan analisis rasio dan analisis statistik uji beda (*t-test*) sehingga dapat diketahui apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah melakukan merger.

### 5. Kesimpulan dan Saran

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran - saran yang dapat diberikan berdasarkan perhitungan dan hasil penelitian secara keseluruhan.

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA

#### 2.1. Tujuan Laporan Keuangan

Pada hakekatnya semua perusahaan atau organisasi memiliki tujuan yang sama yaitu memperoleh laba (*profitability*), memastikan kelangsungan hidup perusahaan (*survival*) dan ingin berkembang untuk masa yang akan datang. Dalam usaha pencapaian tujuan tersebut, laporan keuangan merupakan sumber informasi yang tepat digunakan dalam membuat keputusan yang rasional oleh pihak manajemen perusahaan.

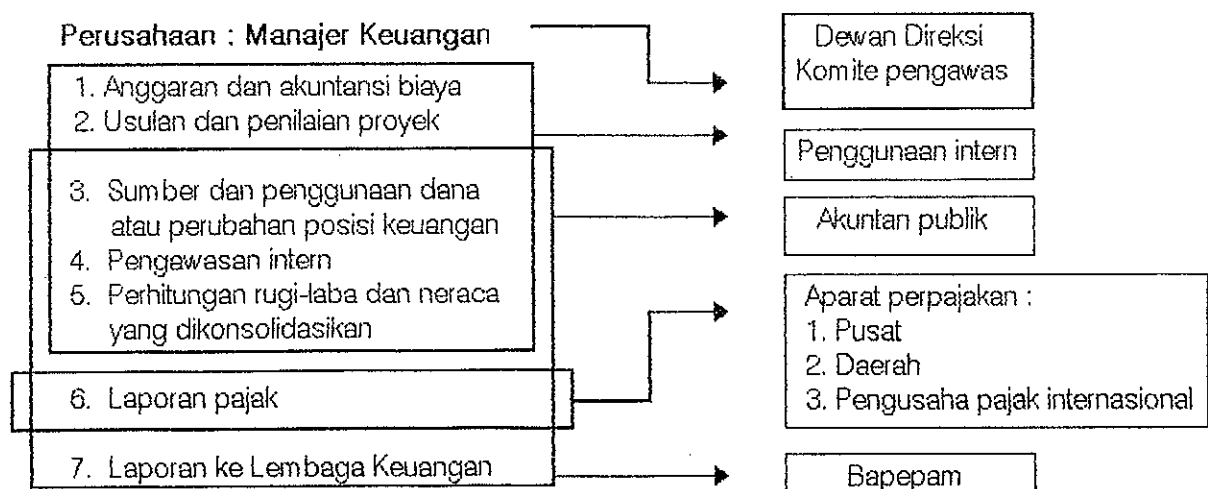
Dalam Standar Akuntansi Indonesia (SAK) yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (1994), mengemukakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan karena secara umum hanya menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian-kejadian masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

Keberagaman analisis keuangan tergantung dari kepentingan-kepentingan pihak tertentu. Van Horne (1989) menjelaskan, secara internal pihak manajemen menggunakan analisis keuangan untuk tujuan pengendalian internal dan penyediaan informasi yang lebih baik mengenai kondisi dan kinerja keuangan perusahaan bagi pemasok modal. Dari sudut pandang pengendalian internal, analisis laporan

keuangan sangat diperlukan dalam rangka melakukan perencanaan dan pengawasan secara efektif. Dengan demikian, fokus perhatian lebih ditujukan terhadap laba atas investasi yang berasal dari berbagai aktiva perusahaan dan juga efisiensi pengelolaan aktiva. Dalam membuat perencanaan, pihak manajemen harus menilai posisi keuangan perusahaan saat ini dan mengevaluasi kesempatan-kesempatan sehubungan dengan posisi saat ini.

Perusahaan dan penyedia modal dari luar-kreditor dan investor menggunakan analisis laporan keuangan. Jenis analisis tergantung dari kepentingan tertentu masing-masing pihak yang terlibat. Kreditor-kreditor perdagangan terutama tertarik pada likuiditas perusahaan. Tuntutan mereka bersifat jangka pendek dan kemampuan perusahaan untuk membayar pinjaman dinilai dari likuiditas perusahaan. Sedangkan tuntutan dari pemegang obligasi bersifat jangka panjang. Pemegang obligasi lebih tertarik kepada kemampuan arus kas perusahaan untuk membayar hutang jangka panjang. Mereka menilai kemampuan tersebut dengan jalan melakukan analisis struktur modal perusahaan, sumber dan dana penggunaan dana utama, laba perusahaan serta proyeksi laba di masa yang akan datang.

Gambar 2.1. Pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan



Sumber : Weston and Copeland (1987)

## 2.2. Analisis Rasio Keuangan

Berbagai macam rasio keuangan telah banyak dikemukakan oleh para ahli dan pada umumnya mereka mengklasifikasikan ke dalam empat atau lima kelompok rasio keuangan yaitu rasio likuiditas (*liquidity ratio*), rasio aktivitas (*activity ratio*), rasio pengungkit keuangan/hutang (*financial leverage ratio*), rasio keuntungan (*profitability ratio*) serta rasio pasar (*market value ratio*).

Fruhan, et. al (1992) menyatakan ukuran yang sangat lazim dipakai dalam penelitian kinerja suatu perusahaan dinyatakan dalam rasio finansial yang dibagi dalam empat katagori utama : rasio keuntungan (profitabilitas), rasio aktivitas (efisiensi), rasio pengungkit hutang (*leverage*) dan rasio likuiditas.

### 2.2.1. Rasio Keuntungan (Profitabilitas)

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisa profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang akan diterima dalam bentuk dividen (Agus Sartono, 1998). Termasuk dalam kelompok ini :

- a. *Net Profit Margin (NPM)*, yaitu rasio antara laba bersih setelah pajak terhadap penjualan bersih. Rasio ini mengukur nilai keuntungan berkenaan dengan tingkat penjualan.
- b. *Return On Assets (ROA)*, yaitu rasio antara keuntungan bersih setelah pajak terhadap jumlah asset keseluruhan yang juga berarti merupakan suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian (%) dari asset yang kita miliki.



- c. *Return On Equity (ROE)*, yaitu rasio antara laba bersih setelah pajak terhadap penyertaan modal saham sendiri yang berarti juga merupakan ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian (%) dari saham sendiri yang ditanamkan dalam bisnis yang bersangkutan.
- d. *Return on Investment (ROI)*, yaitu rasio antara laba bersih setelah pajak terhadap jumlah modal (hutang dan saham) yang ditanamkan di bisnis yang bersangkutan.

### 2.2.2. Rasio Aktivitas (Efisiensi)

Rasio aktivitas mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber-sumber daya sebagaimana digariskan oleh kebijaksanaan perusahaan. Rasio-rasio ini menyangkut perbandingan antara penjualan bersih dengan berbagai investasi dalam aktiva-aktiva (Suad Husnan, 1993). Termasuk dalam katagori rasio efisiensi adalah :

- a. *Total Asset Turnover (TATO)*, mengukur efisiensi relatif dari total aktiva untuk meningkatkan penjualan, dinyatakan dengan rasio antara penjualan terhadap jumlah harta keseluruhan.
- b. *Collection Period*, yaitu mengukur jangka waktu pembayaran piutang oleh pembeli. Rasio ini digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat likuiditas aktiva lancar yang berbentuk piutang jangka pendek.
- c. *Inventory Turnover (ITO)*, yaitu mengukur tingkat perputaran barang dari persediaan ke penjualan dan dinyatakan dengan rasio antara harga pokok penjualan (HPP) terhadap tingkat persediaan.

### 2.2.3. Rasio Pengungkit Hutang (*Leverage*)

Rasio *leverage* menunjukkan seberapa banyak dana yang disupply oleh pemilik perusahaan dalam proporsinya dengan dana yang diperoleh dari kreditur perusahaan. Adanya penggunaan hutang bagi perusahaan mengandung beberapa implikasi : (1) pemberi kredit akan menitikberatkan pada besarnya jaminan atas kredit yang diberikan, (2) apabila perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari beban tetapnya maka keuntungan pemilik perusahaan akan meningkat dan (3) pemilik perusahaan akan memperoleh dana dan tidak kehilangan pengendalian perusahaan (Agus Sartono, 1998).

Ada dua cara dalam perhitungan rasio leverage yaitu pertama, dengan memperhatikan data yang ada di neraca untuk mengetahui seberapa banyak dana pinjaman yang digunakan dalam perusahaan. Kedua, mengukur risiko hutang dari laporan rugi laba yaitu seberapa banyak beban tetap hutang (bunga plus pokok pinjaman) bisa tertutup oleh biaya operasi (Suad Husnan, 1993) . Termasuk dalam rasio ini :

- a. *Debt Ratio*, yaitu perbandingan jumlah hutang terhadap aktiva total. Rasio hutang mengukur banyaknya uang perusahaan yang diperoleh dengan cara berhutang kepada para kreditur perusahaan.
- b. *Debt Equity Ratio (DER)*, yaitu perbandingan jumlah modal saham terhadap jumlah modal keseluruhan. Merupakan indikasi kekayaan dari pendanaan hutang yang relatif digunakan terhadap pendanaan ekuitas.

#### 2.2.4. Rasio Likuiditas

Likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio ini membandingkan kewajiban jangka pendek dengan sumber jangka pendek untuk memenuhi kewajiban tersebut (Van Home, 1987).

Aspek likuiditas dikaitkan dengan satu periode tahun buku atau kadang-kadang didefinisikan dengan siklus operasi normal perusahaan, yaitu jangka waktu yang tercakup mulai dari aktivitas pembelian, proses produksi, penjualan hingga aktivitas pengumpulan piutang (Hamanto, 1987). Termasuk dalam katagori ini adalah:

a. *Current Ratio*, yaitu rasio antara harta lancar terhadap kewajiban jangka pendek.

Rasio ini mencerminkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar dari aktiva lancar.

b. *Quick Ratio atau Acid Test Ratio*, yaitu rasio antara aktiva lancar tanpa persediaan terhadap kewajiban lancar jangka pendek. Hanya aktiva yang benar-benar likuid saja (atau cepat) digunakan dalam rasio ini.

c. *Cash Ratio*, menunjukkan kemampuan perusahaan yang sesungguhnya dalam memenuhi kewajibannya yang harus segera dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam perusahaan dan efek yang dapat segera diuangkan.

Laporan keuangan dianalisis untuk mempelajari hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan tersebut sehingga dapat diketahui perubahan masing-masing pos yang diperbandingkan dan pada akhirnya dapat diketahui posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan.

Pengukuran hubungan antara masing-masing pos digunakan suatu metode dan teknik analisis (Munawir 1995). Ada beberapa metode yang digunakan dalam analisis laporan keuangan :

#### 1. Metode Horisontal

Analisis dengan mengadakan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat sehingga akan diketahui perkembangannya. Metode ini juga disebut metode analisis dinamis.

#### 2. Metode Vertikal

Analisis berdasarkan satu periode atau satu saat saja yaitu dengan membandingkan antara pos yang satu dengan pos lainnya dalam laporan keuangan tersebut, sehingga hanya akan diketahui keadaan atau hasil operasi pada saat itu saja. Metode ini disebut juga metode analisis statis.

Sedangkan teknik analisis yang digunakan dalam analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut :

#### 1. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan

Teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih dengan menunjukkan data absolut atau jumlah dalam rupiah, kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah, kenaikan atau penurunan dalam prosentase, perbandingan yang dinyatakan dalam rasio dan prosentase dari total.

#### 2. Trend atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam prosentase (*Trend Percentage Analysis*)

Merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi dari keadaan keuangan suatu perusahaan apakah menunjukkan tendensi tetap, naik atau bahkan turun.

### 3. Laporan Dengan Prosentase per Komponen (*Common size statement*)

Teknik analisis untuk mengetahui prosentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap total aktivanya, juga untuk mengetahui struktur permodalan dan komposisi pembiayaan yang terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualannya pada suatu perusahaan.

### 4. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja

Teknik analisis untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode tertentu.

### 5. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas (*Cash Flow Statement Analysis*)

Teknik analisis untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas atau untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas selama periode tertentu.

### 6. Analisis Rasio

Merupakan teknik analisis untuk mengetahui hubungan antara pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan rugi laba secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut.

### 7. Analisis Perubahan Laba Kotor (*Gross Profit Analysis*)

Merupakan teknik analisis untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dari satu periode ke periode yang lain atau perubahan laba kotor suatu periode dengan laba yang dibudgetkan untuk periode tertentu.

### 8. Analisis Break Even (*Break Even Analysis*)

Suatu teknik untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh suatu

perusahaan agar perusahaan dalam keadaan impas.

### 2.3. Laporan Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasi menggabungkan seluruh perusahaan yang dikendalikan oleh induk perusahaan. Pengendalian (*control*) dianggap ada apabila induk perusahaan memiliki baik secara langsung atau tidak langsung kepemilikan lebih dari 50% hak suara saham yang telah ditempatkan (*outstanding voting shares*) pada perusahaan lain. Walaupun suatu perusahaan memiliki hak suara 50% atau kurang, pengendalian tetap ada apabila dibuktikan adanya salah satu kondisi berikut :

- (a) Mempunyai hak suara yang lebih dari 50% berdasarkan suatu perjanjian dengan investor lainnya
- (b) Mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan operasional perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian
- (c) Mampu menunjuk atau memberhentikan mayoritas pengurus perusahaan
- (d) Mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat pengurus

Namun dalam PSAK no. 4 paragraf 06 memberikan pengecualian anak perusahaan yang tidak perlu dikonsolidasi, yaitu apabila :

- (a) Pengendalian dimaksudkan untuk sementara, karena saham anak perusahaan dengan tujuan untuk dijual atau dialihkan dalam jangka pendek
- (b) Anak perusahaan dibatasi oleh suatu restriksi jangka panjang sehingga mempengaruhi secara signifikan kemampuannya dalam mentransfer dana kepada induk perusahaan.

Jadi meskipun anak perusahaan memiliki kegiatan usaha yang berbeda dengan kegiatan perusahaan lainnya maka dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi harus diungkapkan kegiatan usaha khusus dari anak perusahaan tersebut.

#### 2.4. Merger (Penggabungan Usaha)

Istilah merger dan konsolidasi sering digunakan sebagai sinonim untuk penggabungan usaha dan akuisisi, padahal pengertian bagi keduanya adalah berbeda. Istilah penggabungan usaha atau merger secara historis bermula dari negara Amerika. Henry Campbell dalam bukunya *Black's Law Dictionary* menjelaskan definisi merger, konsolidasi dan akuisisi. Disebutkan bahwa merger merupakan penyatuan atau peleburan atau penyerapan satu perusahaan oleh perusahaan lain dan yang menyerap akan mempertahankan nama dan identitasnya sendiri serta memperoleh aktiva, tanggung jawab, hak suara, dan kewenangan atau kekuasaan sebagai suatu badan usaha yang terpisah menjadi berakhir. Dan yang menjadikan merger berbeda dengan peleburan (*consolidation*) karena pada peleburan, keberadaan semua perusahaan berakhir dan kemudian menjadi bagian dari perusahaan yang baru.

Konsolidasi perseroan terjadi apabila dua atau lebih perseroan dimatikan dengan proses yang sama. Selanjutnya perusahaan baru mengambil alih aktiva dan menerima tanggung jawab dari perseroan yang mati. Dengan kata lain, konsolidasi perseroan menyatukan dua atau lebih perseroan dalam satu perseroan baru yang memiliki modal gabungan, hak suara dan kekuasaan serta semua unsurnya.

Dan definisi dari akuisisi adalah tindakan untuk menjadi pemilik dari suatu properti tertentu.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dalam Bab VIII (Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan) pasal 102 sampai dengan pasal 109, secara formal belum mengatur secara tegas mengenai definisi tentang merger, konsolidasi dan akuisisi serta perbedaan diantara ketiganya.

Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan batasan pengertian penggabungan bersama-sama dengan peleburan, menyebutkan bahwa satu perseroan atau lebih dapat menggabungkan diri menjadi satu dengan perseroan yang telah ada atau meleburkan diri dengan perseroan lain dan membentuk perseroan baru.

Mengenai pengambilalihan usaha atau akuisisi, dalam pasal 103 ayat (1) & (2) menyatakan pengambilalihan perseroan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan. Pengambilalihan tersebut dapat dilakukan melalui pengambilalihan seluruh atau sebagian besar saham yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Selain pengertian dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas diatas sebelumnya telah ada peraturan pelaksanaan yang memberikan batasan pengertian merger dan konsolidasi.

Penggabungan usaha atau merger adalah penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung. Sedang yang dimaksud peleburan usaha atau konsolidasi adalah penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi semua badan



usaha yang menggabung tersebut (SK Menkeu RI No. 637/KMK.04/1994).

Berdasarkan uraian pengertian diatas pada hakekatnya penggabungan usaha mengandung penyerapan satu atau lebih perseroan dalam perseroan lain, salah satu perseroan yang kuat tetap berdiri, dengan mendapatkan asset serta kewajiban dari perseroan yang bergabung. Konsolidasi pada dasarnya merupakan penggabungan dua atau lebih perseroan yang kemudian membentuk satu perseroan baru dengan beralihnya segala hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh dua atau lebih perseroan yang meleburkan diri terhadap pihak ketiga dan pemegang saham perseroan ke dalam perseroan baru hasil peleburan. Disini eksistensi dari dua atau lebih perseroan telah menjadi bubar dan melebur dalam perseroan baru.

Akuisisi adalah penggabungan dari dua atau lebih perseroan yang mengakibatkan beralihnya kepemilikan sebagian besar atau seluruh saham perorangan atau perseroan oleh perseroan yang lebih kuat dan beralihnya kontrol atas perseroan yang diambil alih.

Dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 222/KMK.017/1993 tanggal 26 Februari 1993 tentang persyaratan dan tatacara merger, konsolidasi dan akuisisi bank, juga memberikan batasan merger, konsolidasi dan akuisisi sebagai berikut :

- a. Merger (penggabungan usaha) adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan melikuidasi bank-bank lainnya.
- b. Konsolidasi (peleburan usaha) yaitu penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan melikuidasi bank-bank yang ada.
- c. Akuisisi bank adalah pengambilalihan kepemilikan usaha bank.

Sehubungan dengan hal tersebut, khususnya tentang merger dikenal ada 3 bentuk merger dilihat dari jenis kegiatan usahanya (Gaughan, 1996), yaitu :

- a. Merger horisontal, adalah penggabungan dari dua atau lebih perusahaan-perusahaan yang saling bersaing langsung satu dengan yang lain atau dengan kata lain merger horisontal adalah merger dari perusahaan yang memproduksi hasil yang sama atau serupa dan menjualnya di wilayah pemasaran yang sama. Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki kegiatan usaha dan jenis produksinya sama.
- b. Merger vertikal, yaitu merger antara perusahaan yang mempunyai hubungan pembeli dan penjual dimana perusahaan yang satu menghasilkan produk untuk kemudian dijual kepada perusahaan lain. Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di bidang usaha sejenis namun berbeda tingkatannya sehingga dibedakan antara *forward merger* dan *backward merger*.
- c. Merger Konglomerat, merupakan merger antara perusahaan yang beroperasi di pasar terpisah dan berbeda. Sebagai contoh merger antara perusahaan yang mempunyai macam produk yang berbeda, tidak terdapat hubungan ekonomi, tidak saling bersaing dan tidak memiliki hubungan penjual dan pembeli.

Menurut Weston and Copeland (1997) ada perbedaan antara tipe-tipe merger dan pengambilalihan. Secara umum, merger berarti setiap transaksi yang membentuk satu unit ekonomi dari dua atau lebih unit sebelumnya. *Merger horisontal* adalah pada industri yang sama. *Merger vertikal* adalah di antara tahap-tahap yang berbeda dalam suatu industri tertentu misalnya perusahaan baja dapat memadukan ke belakang ke arah pertambangan biji besi dan batubara, atau ke depan ke arah pabrikasi dan

distribusi produk-produk baja. *Merger konglomerat* melibatkan perusahaan-perusahaan dalam industri yang tidak berkaitan. Selanjutnya mereka menambahkan, dari sudut pandang akuntansi, ada perbedaan antara pembelian dan penggabungan kepentingan. Pembelian umumnya mengacu pada akuisisi atas kesatuan yang jauh lebih kecil yang terserap ke dalam perusahaan pengakuisisi. Penggabungan kepentingan merupakan penggabungan dua perusahaan yang ukurannya tidak berbeda jauh, diikuti dengan operasi dimana identitasnya diteruskan sampai tingkat yang cukup besar.

## 2.5. Alasan-Alasan dan Tujuan Merger

Motivasi utama perusahaan dalam melakukan merger dan akuisisi (Gaughan, 1990) adalah sinergi -- dalam hal ini sinergi operasi dan sinergi keuangan -- serta diversifikasi usaha. Sinergi operasi dapat dicapai melalui merger horisontal atau vertikal. Dengan merger horisontal diharapkan dapat mencapai operasi dan skala yang ekonomis, yaitu dengan pengurangan fasilitas yang kembar dan pelaksanaan *product line* yang lebih luas dengan harapan dapat meningkatkan jumlah permintaan. Dengan adanya integrasi vertikal dapat membuahkan koordinasi yang lebih efisien dari hasil menggabungkan tahap-tahap industri yang berbeda.

Menurut Van Horne (1989), selain hal tersebut di atas, perbaikan manajemen, pengaruh informasi, pengalihan kekayaan, penghematan pajak, keuntungan-keuntungan pengungkit keuangan serta agenda pribadi manajemen juga merupakan alasan mengapa perusahaan melakukan penggabungan usaha.

Beams (1998) menambahkan ada beberapa alasan-alasan penggabungan usaha antara lain :

a. Manfaat Biaya (*Cost Advantage*), pada masa inflasi perusahaan akan lebih murah memperoleh fasilitas yang dibutuhkan melalui penggabungan usaha daripada melalui pengembangan usaha.

b. Resiko lebih rendah (*Lower Risk*), apabila tujuan penggabungan adalah diversifikasi maka pembelian lini produk dan pasar yang telah terbentuk biasanya mempunyai resiko lebih kecil daripada dengan pengembangan produk baru.

c. Penundaan Operasi yang Lebih Sedikit (*Fewer Operating Delays*)

Fasilitas-fasilitas pabrik melalui penggabungan usaha dapat diharapkan untuk segera beroperasi dan memenuhi peraturan yang berhubungan dengan lingkungan dan peraturan pemerintah yang lainnya apabila dibandingkan membangun fasilitas perusahaan yang baru yang mungkin menimbulkan sejumlah masalah penundaan pembangunan karena diperlukannya persetujuan pemerintah untuk memulai pengoperasian misalnya.

d. Mencegah Pengambilalihan (*Avoidance of Takeovers*)

Beberapa perusahaan kecil cenderung untuk lebih mudah diambilalih sehingga mereka memakai strategi pembeli yang agresif sebagai pertahanan terbaik.

e. Akuisisi Harta Tidak Berwujud (*Acquisition of Intangible Assets*)

Penggabungan usaha melibatkan penggabungan sumberdaya tidak berwujud maupun berwujud sehingga akuisisi atas hak paten, hak atas mineral, database pelanggan atau keahlian manajemen akan menjadi faktor utama yang memotivasi suatu penggabungan usaha.

f. Alasan-alasan lain

Selain untuk perluasan, perusahaan-perusahaan mungkin memilih penggabungan usaha untuk memperoleh manfaat dari segi pajak (contohnya, *tax-loss carry forwards*) untuk manfaat pajak penghasilan perseorangan dan pajak atas bangunan serta untuk alasan-alasan pribadi.

Agus Sabardi (1994) mengatakan bahwa alasan paling mendasar dari semua kasus restrukturisasi adalah menciptakan nilai bagi para pemegang saham perusahaan, sedangkan berbagai alasan dari langkah restrukturisasi perusahaan yang dikemukakan adalah :

a. Tambahan Efisiensi

Dengan adanya merger diharapkan tercipta suatu sinergi, baik dalam pengoperasian maupun skala ekonomis. Operasi serta skala yang ekonomis dapat dicapai dengan adanya merger horisontal maupun merger vertikal.

b. Perkembangan Manajemen

Melalui manajemen yang berkembang, diharapkan perusahaan dapat menghasilkan laba yang lebih baik. Dengan demikian, perusahaan memberikan informasi yang positif sehingga dapat menaikkan harga saham perusahaan.

c. Transfer Kekayaan

Setiap tindakan yang mengurangi aliran kas seperti merger, akan menghasilkan transfer kekayaan dari pemegang modal sendiri kepada pemegang hutang. Sebaliknya, restrukturisasi yang meningkatkan resiko seperti peningkatan leverage finansial, mungkin menghasilkan transfer kekayaan dari para pemegang utang kepada pemegang modal sendiri.

#### d. Alasan Pajak

Perusahaan dengan kerugian pajak kumulatif mempunyai prospek kecil bagi pemenuhan kerugian pajaknya dimasa yang akan datang. Melalui merger dengan perusahaan yang memiliki laba besar, ada kemungkinan perusahaan lebih efektif memenuhi kekurangannya tersebut.

#### e. Keuntungan Leverage

Pada kebanyakan restrukturisasi perusahaan, jumlah leverage sering meningkat. Pada saat hal itu terjadi, nilai dapat diciptakan bagi para pemegang saham. Terdapat imbang antara pengaruh pajak perusahaan, pengaruh pajak pribadi, biaya kebangkrutan dan biaya agensi serta pengaruh insentif.

#### f. Alasan Pribadi

Bagi perusahaan perorangan, dengan adanya merger dengan perusahaan sudah "*go public*" dapat meningkatkan likuiditas perusahaan, memungkinkan penjualan saham-sahamnya serta dapat mendiversifikasikan investasinya.

Beberapa tujuan dari penggabungan badan usaha perseroan menurut Mas'ud Machfoedz (1995) antara lain pemanfaatan asset yang lebih efisien dalam satu kesatuan perusahaan, integrasi usaha dengan penguasaan atau penggabungan badan usaha yang sejenis serta biaya produksi yang lebih murah, profesionalisme manajemen. Dan dengan adanya penggabungan badan usaha diharapkan akan mampu menarik manajemen yang profesional, serta sinergi finansial dan ekonomis. Bila dihubungkan dengan alasan penggabungan BUMN pertanian, tindakan tersebut dipandang sebagai upaya strategis merestrukturisasi BUMN pertanian sub sektor

perkebunan untuk menjawab segala kesenjangan yang ada pada PT. Perkebunan di Indonesia.

Dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian tentang Pembentukan Tim Perumusan Perantara dan Penataan Konsolidasi BUMN Pertanian dinyatakan bahwa restrukturisasi BUMN merupakan tindakan penataan kembali untuk memantapkan peran dan kemampuannya dalam perekonomian nasional yang mencakup bentuk, struktur organisasi, tata cara kerja sehingga BUMN pertanian dapat melaksanakan tugas sebagai wahana pembangunan melalui perusahaan yang tangguh dan mandiri.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### 3.1. Latar Belakang Pendirian Perusahaan

PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) adalah salah satu perusahaan perseroan terbatas milik negara yang bergerak pada sektor perkebunan yang kepemilikannya merupakan hasil dari rangkaian perjuangan bangsa Indonesia.

PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XV - XVI yang bergerak dibidang tanaman gula dan tetes dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XVIII dibidang aneka tanaman menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero). Saat ini PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) memiliki dua kantor direksi yaitu Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) untuk Divisi Tanaman Tahunan yang dahulu merupakan PT. Perkebunan XVIII (Persero), berdomisili di Jalan Mugas Dalam (Atas) Semarang serta Kantor Direksi Divisi Tanaman Semusim terletak di Jalan Ronggowarsito No. 164 Surakarta.

PT. Perkebunan XVIII (Persero) didirikan pada tanggal 31 Juli 1973 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1972. Berdasarkan sejarah, PT. Perkebunan XVIII (Persero) merupakan penggabungan dari 30 kebun milik ex. Pemerintah Belanda dan perusahaan swasta asing.



Gambaran singkat perkembangan PT. Perkebunan XVIII (Persero) dari kurun waktu 1945 sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut :

#### **Periode Tahun 1945 - 1960**

Pada masa pendudukan Belanda kedua tahun 1947 semua perkebunan dikuasai pemiliknya kembali, tetapi sejak bulan September 1950 perkebunan milik pemerintah Hindia Belanda pengelolaannya diserahkan kepada Pusat Perkebunan Negara (PPN) sedang milik swasta asing tetap dikuasai pemiliknya.

Bentuk organisasi tahun 1950 - 1960 berubah menjadi PPN lama/baru yang dibagi menjadi rayon/unit, tanggal 10 Desember 1957 seluruh perkebunan Belanda diambil alih penguasaannya oleh Pemerintah (Nasionalisasi).

#### **Periode Tahun 1960 - 1967**

Sesuai dengan PP No. 14 tahun 1961 bentuk PPN lama/baru dirubah menjadi PPN Unit Jateng dan sejak tahun 1963 dirubah lagi menjadi PPN Aneka Tanaman XI dan PPN Karet XIII dan XIV.

#### **Periode Tahun 1968 - 1972**

Sesuai dengan PP No. 14 tahun 1968 tanggal 13 April 1968 bentuk perusahaan dirubah lagi menjadi Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) yang merupakan gabungan dari :

1. PPN Aneka Tanaman XI
2. PPN Karet XIII
3. PPN Karet XIV

4. BPU - Aneka Tanaman Perwakilan Jateng
5. BPU - PPN Karet Perwakilan Jateng

#### **Periode Tahun 1973 sampai sekarang**

Sesuai dengan Akte notaris GHS Loemban Tobing, SH Jakarta No. 98 tanggal 31 Juli 1973 disempurnakan dengan Akte Notaris Imah Fatimah, SH Jakarta No. 107 tanggal 13 Agustus 1984 dan Akte Perubahan No. 39 tanggal 8 Maret 1985 sesuai kutipan Surat Menteri Kehakiman RI No. C2.52.5436.HT.01.04 tahun 1985 tanggal 28 Agustus 1985 PN Perkebunan XVIII diubah menjadi Perseroan Terbatas yaitu PT. Perkebunan XVIII (Persero).

Pada tahun 1994 Menteri Keuangan RI selaku pemegang saham PT. Perkebunan XVIII (Persero) mengeluarkan SK Menkeu No. 166/KMK.016/1994 tanggal 2 Mei 1994 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT. Perkebunan XVIII (Persero) serta Mengangkat Perusahaan Perseroan PT. Perkebunan XXI - XXII sebagai Direksi Perusahaan Perseroan PT. Perkebunan XVIII (Persero).

Selanjutnya berdasarkan PP Negara RI No. 14 Tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XV - XVI digabung dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XVIII (Persero) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara IX, dengan Akta Pendirian nomor : 42 tanggal 11 Maret 1996 dihadapan Notaris Harun Kamil, S.H, Jakarta dan modal pendirian sebesar Rp 300 milyar.

### 3.2. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) ditetapkan dalam Surat Keputusan No. PTPN IX.0/SK/149/1999.SM tentang Penyempurnaan Bagan Organisasi PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero). Perusahaan dipimpin oleh Dewan Direksi, Direktur Utama diangkat berdasarkan SK Menkeu RI No. 168/KMK/0.16/1996 tanggal 11 Maret 1996 dan direktur lainnya diangkat berdasarkan SK Menkeu RI No. 259/KMK0.16/1996 tanggal 8 April 1996. Adapun Direksi PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) terdiri atas :

1. Direktur Utama
2. Direktur Produksi
3. Direktur Keuangan
4. Direktur Pemasaran
5. Direktur SDM/Umum

Direktur Utama mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan dan mengkoordinasikan tugas para direktur agar tercapai pelaksanaan operasional perusahaan secara terarah, terkendali dan terpadu. Sedang masing-masing direksi antara lain bertugas memimpin, merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dibidangnya masing-masing dengan para kuasa direksi.

Bagian di Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) (Persero) terdiri atas :

- a. Bagian Satuan Pengawasan Intern berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

- b. Bagian Tanaman Tahunan, Bagian Tanaman Semusim, Bagian Teknik & Bagian Pengolahan Tanaman Tahunan, Bagian Teknik Tanaman Semusim, Bagian Pengolahan Tanaman Semusim diatur oleh Direktur Produksi.
- c. Bagian Pembiayaan dan Bagian Akuntansi diatur oleh Direktur Keuangan.
- d. Bagian Penjualan Produksi dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa diatur oleh Direktur Pemasaran.
- e. Bagian Personalia & Umum dan Bagian Pengkajian serta Pengembangan Usaha diatur oleh Direktur SDM/Umum.

Urusan dibawah Kepala Bagian diatur sebagai berikut :

- a. Urusan di Bagian Satuan Pengawasan Intern
  - 1. Pemeriksaan Keuangan
  - 2. Pemeriksaan Operasional
- b. Urusan di Bagian Tanaman Tahunan
  - 1. Karet dan Saprodi
  - 2. Kopi, Sampingan dan Proteksi
  - 3. Teh, Kakao dan Evaluasi
- c. Urusan di Bagian Tanaman Semusim
  - 1. Kultur Teknis/Percobaan
  - 2. Tebang Angkut
  - 3. Evaluasi dan Saprodi
- d. Urusan di Bagian Teknik & Pengolahan Tanaman Tahunan
  - 1. Pengolahan
  - 2. Mesin dan Instalasi

- e. Urusan di Bagian Teknik Tanaman Semusim
  - 1. Mesin dan Instalasi
  - 2. Sentral Listrik & Turbin Uap, Listrik dan Instrumentasi
  - 3. Bengkel Transportasi & Civil
- f. Urusan di Bagian Pengolahan Tanaman Semusim
  - 1. Pengolahan/Teknologi
  - 2. Pengolahan Data dan Evaluasi
- g. Urusan di Bagian Pembiayaan
  - 1. Perencanaan dan Anggaran Belanja
  - 2. Keuangan/Pajak & Asuransi
  - 3. Modal Kerja
- h. Urusan di Bagian Akuntansi
  - 1. Verifikasi
  - 2. Akuntansi
- i. Urusan di Bagian Penjualan Produksi
  - 1. Kontrak Penjualan
  - 2. Distribusi Penjualan
- j. Urusan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
  - 1. Pengadaan Barang/Jasa, Barang Investasi dan Administrasi Tagihan Umum
  - 2. Pengadaan Barang/Jasa, Barang Teknik dan Pembantu Pengolahan Bulk.
- k. Urusan di Bagian Personalia & Umum
  - 1. Personalia & PSDM
  - 2. H A K

3. Umum
4. Rumah Tangga & Sekretariat
- e. Urusan di Bagian Pengkajian & Pengembangan Usaha
  1. P D E
  2. Perencanaan dan Pemantauan Pengembangan Usaha
  3. Pengkajian Usaha-Usaha Pengembangan

### 3.3. Ruang Lingkup Kegiatan Usaha

Sebelum tahun 1995 PT. Perkebunan XVIII (Persero) mengusahakan (menanam, memelihara, dan mengolah) empat komoditi pokok yaitu karet, teh, kopi, kakao, disamping itu juga memproduksi kelapa, pala/minyak pala, kapok/biji kapok dan cengkeh. Komoditi-komoditi tersebut (kelapa, pala/minyak pala, dst) pada tahun 1994 masih termasuk hasil pokok, tetapi sejak tahun 1995 menjadi hasil sampingan karena arealnya secara administratif dihapuskan/tidak dioperasikan dengan pertimbangan prospeknya kurang menguntungkan dimasa yang akan datang. Dari keempat komoditi pokok, karet merupakan penyumbang pendapatan terbesar yakni pada tahun 1995 sekitar 80% (Tabel 3.1).

Tingginya prosentase komoditi karet dalam menyumbang pendapatan perusahaan (83,76%), lebih banyak disebabkan selain memiliki kebun tradisional (*existing*), pada saat itu PT. Perkebunan XVIII (Persero) juga ditugasi oleh pemerintah untuk mengelola Kebun Proyek Pengembangan di Kalimantan Selatan dimana kebun-kebun tersebut membudidayakan jenis komoditi karet.

**Tabel 3.1. Hasil Penjualan Seluruh Komoditi PT. Perkebunan XVIII (Persero)  
Tahun 1995 (dalam .000 Rupiah)**

Budidaya	Realisasi Th. 1995 (a)	Anggaran Th 1995 (b)	Prosentase (a:b)	Realisasi Th. 1994 (c)	Prosentase (a:c)
Karet	101.362.322	84.895.400	78.938.531	123,53	128,40
L. Pekat	3.745.126				
Teh	5.239.998		4.622.620	87,08	113,29
Kopi	8.491.230	6.014.400	8.795.589	92,41	96,53
Kakao	1.295.747		2.077.177	71,36	62,38
Kapuk	792.125	9.188.438	434.495		182,31
Bj. Kapuk	52.945		71.644		73,90
Kapas		1.815.628	1.124.238		
Bj. Kapas	32.727		144.251		22,69
M. Pala	28.288		64.900		
Cengkeh			61.806		
Gg.Cengkeh			1.275		
Karet glg			131.895		
Kelapa			155.712		
Jumlah	121.040.508	101.913.863	96.624.133	118,77	125,26

Sumber : Data Sekunder

Adapun jenis komoditi yang dikelola oleh PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) adalah komoditi pokok yang dibudidayakan eks PT. Perkebunan XVIII (Persero) dan eks PT. Perkebunan XV-XVI (Persero), yaitu dari tebu, karet, teh, kopi, dan kakao.

Unit-unit pabrik yang ada meliputi : pabrik gula terdiri atas 13 unit, kebun/pabrik karet (13 unit), kebun/pabrik teh (3 unit), kebun/pabrik kopi (5 unit), kebun/pabrik kakao (4 unit) serta komoditi lain-lain antara lain 1 unit pabrik pala, 1 unit pabrik kapuk, 1 unit pabrik kapas dan 1 unit pabrik karet gelang.

### 3.4. Bidang Usaha

Bidang usaha PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) meliputi empat bidang :

1. Bidang Pengusahaan Budidaya Tanaman, meliputi pembukaan dan pengolahan lahan, pembibitan, penanaman dan pemeliharaan serta melakukan kegiatan lain yang berhubungan dengan pengusahaan budidaya tanaman.
2. Bidang Produksi, meliputi pemungutan hasil tanaman, pengolahan hasil tanaman sendiri maupun dari pihak lain menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi.
3. Bidang Perdagangan, meliputi kegiatan pemasaran berbagai macam hasil produksi serta melakukan kegiatan perdagangan barang lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha perseroan.
4. Bidang Pengembangan Usaha Perkebunan, meliputi kegiatan agrowisata dan agrobisnis.

Misi yang diemban PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) adalah melaksanakan Tri Dharma Perkebunan plus (sebagai wahana pembangunan) :

1. Menghasilkan devisa maupun rupiah negara dengan cara seefisien-efisiennya.
2. Memenuhi fungsi sosial, diantaranya berupa pemeliharaan/penambahan lapangan kerja bagi warga negara Indonesia.
3. Memelihara kekayaan alam, berupa pemeliharaan serta peningkatan kesuburan tanah dan tanaman.

### **3.5. Wilayah Kerja**

#### **3.5.1. Wilayah kerja Sebelum Penggabungan (Merger)**

Areal tanaman PT. Perkebunan XVIII (Persero) terbagi dua wilayah, yaitu kebun tradisional (*kebun existing*) yang terdiri atas 16 kebun *existing* yang tersebar di



seluruh Jawa Tengah serta Kebun Proyek Pengembangan Perkebunan.

Selain mengelola kebun-kebun sendiri/*existing*, PT. Perkebunan XVIII (Persero) juga ditugasi oleh pemerintah untuk mengelola Proyek Pengembangan Perkebunan di Propinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Jawa Tengah. Wilayah kerja atau areal tanaman dari PT. Perkebunan XVIII (Persero) dapat ditunjukkan pada tabel 3.2.

**Tabel 3.2. Areal Tanaman PT. Perkebunan XVIII (Persero) Tahun 1995**

KEBUN	JENIS KOMODITI	LOKASI
<b>a. Kebun Existing</b>		
Wamasari	Karet, kakao	Banjar, Jateng
Kawung	Karet, kakao	Cilacap, Jateng
Krumput	Karet, kakao	Banyumas, Jateng
Semugih/Kaligua	Teh, kakao	Pemalang/Burniayu
Blimbing	Karet	Pekalongan, Jateng
Jolotigo	Teh, kopi	Pekalongan, Jateng
Siluwok/Subah	Karet, kopi, kakao	Batang, Jateng
Sukamangli	Karet, kopi, kakao	Kendal, Jateng
Merbuh	Karet, kopi	Kendal, Jateng
Ngobo	Karet, kopi, kakao	Semarang, Jateng
Getas	Karet, kopi, kakao	Salatiga, Jateng
Kerjoarum	Karet	Sragen, Jateng
Batujamus	Karet, kopi, kakao	Karanganyar, Jateng
Balong/Beji	Karet, kopi	Jepara, Jateng
Jollong/Kalitelo	Kopi, karet	Pati, Jateng
Danau Salak	Karet	Banjar, Kalsel
<b>b. Proyek Inti/Plasma</b>		
PIR III Plasma DAS/CRF Tambarangan	Karet, karet remah	Banjar, Kalsel
PIRSUS I Buntok	Karet	Barito Selatan, Kalsel
PIRSUS I Batulicin/PIRSUS II Pamukan	Karet	Pulau Laut, Kalsel
PIRSUS II Paringin	Karet	Hulusungai utara, Kalsel
PIRSUS II Tabalong	Karet	Tanjung, Kalsel
Pabrik Kapas Kudus	Karet	Kudus, Jateng
Rumah Sakit Danau Salak		Banjar, Kalsel

Sumber : Data sekunder

### 3.5.2. Wilayah Kerja Setelah Penggabungan (Merger)

Sejak penggabungan, wilayah kerja PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero)

meliputi seluruh Jawa Tengah sedang unit-unit usaha yang dimiliki sebanyak 20 SBU, yang terdiri atas 8 unit Pabrik Gula dan 12 unit kebun sebagai berikut :

I. Pabrik Gula

1. PG Jatibarang/Afdeling Banjarnatna, lokasi di Dati II Brebes
2. PG Pangka/Afdeling Kalibagor, lokasi di Dati II Tegal
3. PG Sumberharjo, lokasi di Dati II Pemalang
4. PG Sragi/Afdeling Cepiring, lokasi di Dati II Pekalongan
5. PG Rendeng, lokasi di Dati II Kudus
6. PG Mojo, lokasi di Dati II Sragen
7. PG Tasikmadu/Afdeling Colomadu, lokasi di Dati II Karanganyar
8. PG Gondang Baru/Afdeling Ceper Baru, lokasi di Dati II Klaten

II. Kebun Tanaman Tahunan

Kebun milik PT.Perkebunan Nusantara IX (Persero) dapat dilihat pada tabel 3.3.

**Tabel 3.3. Kebun Tanaman Tahunan PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan**

KEBUN	LUAS (Ha)
1. Kebun Kawung/Wamasari	5.242,64
2. Kebun Krumpit	2.091,22
3. Kebun Kaligua/Semugih	1.689,92
4. Kebun Blimbing/Jolotigo	3.544,29
7. Kebun Siluwok/Subah	4.445,74
8. Kebun Sukamangli	2.477,39
9. Kebun Merbuh	2.917,02
10. Kebun Ngobo	2.261,02
11. Kebun Batujamus/Kerjo Arum	6.944,10
12. Kebun Getas	2.216,06
13. Kebun Balong/Beji	3.863,70
14. Kebun Jollong/Kalitelo	1.440,27

Sumber : Data Sekunder

Dalam perkembangannya, pada tahun 1998 guna memperbaiki kinerja PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) pihak manajemen telah mengambil langkah kebijakan antara lain dengan penutupan lima pabrik gula (PG Jatibarang/Afdeling Banjaratma, PG Pangka/Afdeling Kalibagor, PG Sragi/Afdeling Cepiring, PG Tasikmadu/Afdeling Colomadu, PG Gondang Baru/Afdeling Ceper Baru) yang dianggap sudah tidak prospektif karena tidak tersedianya pasokan bahan baku untuk mencukupi kapasitas produksi.

## BAB IV

### ANALISIS DATA

Dalam penilaian kinerja keuangan PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) (Persero) Divisi Tanaman Tahunan menggunakan data laporan keuangan meliputi Neraca serta Laporan Rugi Laba selama periode pembukuan tahun 1992 sampai tahun 1999. Selama delapan tahun periode penelitian tersebut dibagi menjadi dua yaitu periode sebelum melakukan merger (1992-1995) dan periode sesudah melakukan merger (1996-1999).

Laporan keuangan tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis rasio keuangan serta analisis statistik *t-test* dan selanjutnya dapat diketahui apakah ada perbedaan kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah melakukan merger.

Hasil pengujian *t-test* dengan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) = 5 % terlihat pada tabel 4.1. berikut.

**Tabel 4.1. Hasil uji *t-test* seluruh rasio keuangan**

No	Rasio Keuangan	Nilai t hit	Prob	Berbeda nyata/tidak
1.	Debt Equity Ratio	4,0013	0,003554	Berbeda nyata
2.	Cash Ratio	- 0,7781	0,2330	Tidak berbeda nyata
3.	Net Working Capital to Total Asset	- 4,1833	0,002896	Berbeda nyata
4.	Inventory Turnover	0,6487	0,2703	Tidak berbeda nyata
5.	Total Asset Turnover	0,0133	0,4949	Tidak berbeda nyata
6.	Collection Period	0,4817	0,3235	Tidak berbeda nyata
7.	Return on Equity	- 1,9151	0,0520	Tidak berbeda nyata*
8.	Return on Asset	- 1,7219	0,0679	Tidak berbeda nyata*
9.	Net Profit Margin	- 3,1138	0,0104	Berbeda nyata

Keterangan : tanda \* artinya pada tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) = 10 % menunjukkan berbeda nyata

#### 4.1. Rasio Pengungkit Hutang (*Leverage*)

Rasio ini ditujukan untuk mengukur sebatas mana total aktiva dibiayai oleh pemilik jika dibandingkan dengan pembiayaan yang disediakan oleh para kreditur. Rasio *leverage* yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan salah satunya adalah *Debt Equity Ratio (DER)*.

*Debt Equity Ratio* digunakan dalam mengukur proporsi besarnya hutang jangka panjang terhadap struktur pemodal perusahaan. Semakin rendah rasio semakin tinggi tingkat pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham dan semakin besar pula batas pengaman pemberi pinjaman jika terjadi penyusutan nilai aktiva atau kerugian.

Rasio hutang terhadap ekuitas dihitung dengan rumus :

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Ekuitas}} \times 100 \%$$

Hasil perhitungan rasio hutang terhadap ekuitas PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan selama tahun 1992-1999 disajikan pada tabel 4.1. Tabel 4.1 menunjukkan rasio hutang terhadap ekuitas PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan. Pada periode empat tahun pertama (1992-1995) rasio ini selalu mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan total hutang terutama hutang lancar selama tahun-tahun tersebut. Selanjutnya pada periode sesudah merger, nilai *Debt Equity Ratio* juga meningkat selama tahun 1997-1999 namun nilainya lebih kecil daripada tahun-tahun sebelum melakukan merger.

Tabel 4.2. Perhitungan *Debt Equity Ratio* PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi TanamanTahunan sebelum dan sesudah merger (dalam Rupiah)

Tahun	Total Hutang	Ekuitas	DER (%)	Naik/(turun)
1992	33.567.880.918	103.582.198.803	32,4070	
1993	38.585.543.415	104.329.422.343	36,9652	naik
1994	44.993.749.842	107.891.223.759	41,7029	naik
1995	52.170.049.964	126.420.201.538	41,2672	(turun)
		rata-rata	38,0855	
1996	23.736.682.032	103.566.608.039	22,9192	(turun)
1997	16.948.427.108	116.569.445.447	14,5393	(turun)
1998	44.092.415.677	182.099.530.299	24,2134	naik
1999	55.408.202.651	186.695.327.775	29,6784	naik
		rata-rata	22,8376	-

Sumber : Data sekunder yang diolah

Secara keseluruhan rata-rata rasio hutang terhadap ekuitas selama tahun 1992-1995 adalah sebesar 38,0855 % yang berarti setiap Rp. 1,00 yang disediakan pemegang saham menjamin Rp. 0,38085 hutang dari pemberi pinjaman. Untuk empat tahun kedua (1996-1999) rata-rata rasio hutang terhadap ekuitas adalah sebesar 22,8376 %, .

Selanjutnya dari analisis statistik diketahui nilai t hitung berada di daerah penolakan  $H_0$  karena t hitung = 4,0013 lebih besar dari batas atas nilai kritis t = 1,9432. Dengan demikian kita menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$  yang menyatakan bahwa terdapat *debt equity ratio* sebelum merger lebih tinggi daripada *debt equity ratio* sesudah merger.

Nilai probabilitas = 0,003554 menunjukkan kemungkinan terjadinya kesalahan atas penolakan  $H_0$  adalah sebesar 0,3554 %. Ini berarti terdapat perbedaan sangat nyata atau rata-rata *debt equity ratio* sebelum merger lebih tinggi daripada rata-rata *debt equity ratio* sesudah merger.

PT. PUSIAK - BNDP

Rata-rata rasio hutang terhadap ekuitas PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan selama periode 1992-1995 lebih tinggi sebab total hutang selama periode itu lebih banyak dan merupakan hutang modal kerja untuk proyek pengembangan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) di Propinsi Kalimantan Selatan.

#### 4.2. Rasio Likuiditas

Rasio ini mengukur seberapa likuid perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo. Likuiditas perusahaan ditunjukkan oleh besar kecilnya aktiva lancar yaitu aktiva yang mudah untuk diubah menjadi kas yang meliputi kas, surat berharga, piutang dan persediaan. Penelitian ini dalam melakukan analisis likuiditas PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan menggunakan rasio kas (*cash ratio*) dan *net working capital to total asset*. Rasio kas menunjukkan kemampuan perusahaan yang sesungguhnya dalam memenuhi kewajibannya yang harus segera dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam perusahaan dan efek yang dapat segera diuangkan. Rasio kas dihitung dengan membagi kas dan bank ditambah surat berharga dengan hutang lancar.

Hanya kas yang disimpan dalam bentuk rekening giro pada bank dapat yang dipertimbangkan dalam menilai tingkat likuiditas perusahaan. Simpanan dalam bentuk deposito, rekening giro yang diblokir oleh bank, bank garansi, karena tujuan dan jangka waktu penggunaannya dibatasi, tidak dapat diikutsertakan dalam penilaian aspek likuiditas.

Efek atau surat berharga merupakan sejumlah kas yang ditanamkan dalam bentuk surat-surat berharga, untuk kemudian dijual kembali pada saat kas dibutuhkan

dalam kegiatan perusahaan. Terhadap surat berharga ini perhatian utama harus ditujukan kepada dasar penilaiannya, karena selain berdasarkan harga pasarnya maka ada kemungkinan terjadi penurunan nilai dalam proses penjualan efek menjadi kas.

$$\text{Rasio Kas} = \frac{\text{kas} + \text{bank} + \text{surat berharga}}{\text{hutang lancar}} \times 100\%$$

Berikut ini disajikan tabel hasil perhitungan rasio kas PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan selama tahun 1992-1999.

**Tabel 4.3. Perhitungan *Cash Ratio* PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan sebelum dan sesudah merger (dalam Rupiah)**

Tahun	Kas + Bank + Surat Berharga	Hutang Lancar	<i>Cash Ratio</i> (%)	Naik/(turun)
1992	4.748.410.637	12.999.302.871	36,5282	
1993	7.564.162.450	20.716.640.359	36,5125	(turun)
1994	21.112.105.832	32.566.747.619	64,8272	naik
1995	24.121.929.570	42.744.696.632	56,4326	(turun)
		rata-rata	48,5751	
1996	18.158.747.786	22.076.541.363	32,4269	(turun)
1997	22.673.491.349	15.552.780.689	145,7842	naik
1998	20.400.508.351	42.929.799.508	47,5206	(turun)
1999	28.252.398.037	54.429.799.205	51,9061	naik
		rata-rata	69,4095	

Sumber : Data sekunder yang diolah

Selama empat periode kedua (1996-1999) terlihat rasio kas sangat berfluktuasi bahkan mengalami peningkatan serta penurunan yang cukup tajam selama tahun 1996-1998. Fluktuasi tersebut disebabkan pada tahun 1996-1997, berkurangnya hutang lancar ternyata diikuti dengan bertambahnya jumlah kas dan bank sehingga menyebabkan peningkatan sebesar 113,3573 %. Sebaliknya untuk 1997-1998, terjadi penurunan jumlah pada pos aktiva lancar dan penurunan ini diikuti



dengan kenaikan hutang lancar yang mengakibatkan likuiditas perusahaan menurun sebesar 98,2636 %.

Secara keseluruhan rata-rata rasio kas selama tahun 1992-1995 adalah sebesar 48,5751 % yang berarti setiap Rp. 1,00 hutang lancar dijamin dengan Rp. 0,4857 kas dan bank ditambah surat berharga. Untuk empat tahun kedua (1996-1999) rata-rata rasio kas adalah sebesar 69,4095 %, yang berarti likuiditas perusahaan menjadi lebih baik.

Nilai  $t$  hitung berada di daerah penerimaan  $H_0$  karena  $t$  hitung = -0,7781 lebih kecil dari batas atas nilai kritis  $t = -1,9432$ . Dengan demikian kita menolak  $H_1$  dan menerima  $H_0$  yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan *cash ratio* sebelum dan sesudah merger.

Nilai probabilitas = 0,2330 menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan pada tingkat signifikansi yang telah ditentukan ( $\alpha$ ) = 0,05. Dengan demikian perbedaan sebesar 0,2330 dapat diabaikan. Atau dengan kata lain rata-rata *cash ratio* sebelum merger tidak berbeda dengan rata-rata *cash ratio* sesudah merger.

*Net Working Capital to Total Asset* dapat digunakan untuk melihat secara ekstrim apakah suatu perusahaan mengalami kesulitan likuiditas keuangan atau tidak serta melihat posisi dari modal kerja bersih. *Net working capital* atau modal kerja merupakan indikator untuk menilai likuiditas suatu perusahaan telah diterima secara luas, oleh semua pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Para kreditur dan calon kreditur membandingkan aktiva lancar dengan hutang lancarnya serta mengidentifikasi jumlah modal kerja perusahaan. Biasanya jumlah minimum modal kerja merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang

mengadakan ikatan kontrak, permohonan kredit ke bank dan sebagainya.

*Net Working Capital to Total Asset* dapat dicari dengan rumus :

$$\text{Rasio modal kerja terhadap total aktiva} = \frac{\text{aktiva lancar - kewajiban lancar}}{\text{total aktiva}} \times 100\%$$

Berikut ini disajikan tabel hasil perhitungan rasio modal kerja terhadap total aktiva PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan selama tahun 1992-1999.

**Tabel 4.4.** Perhitungan *Net Working Capital to Total Asset* PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan sebelum dan sesudah merger (dalam Rupiah)

Tahun	Aktiva lancar - Kewajiban lancar	Total Aktiva	<i>Net Working Capital to Total Asset</i>	Naik/(turun)
1992	11.239.586.158	137.150.079.721	8,1951	
1993	3.312.398.683	142.894.965.758	2,3181	(turun)
1994	955.746.210	152.884.973.601	0,6251	(turun)
1995	9.536.816.612	178.590.251.502	5,3400	naik
		rata-rata	4,1196	
1996	20.865.595.113	127.303.290.071	16,3905	naik
1997	23.568.495.344	133.517.872.355	17,9519	naik
1998	80.565.949.676	226.191.945.976	35,6184	naik
1999	65.787.967.351	242.767.530.427	27,0992	(turun)
		rata-rata	24,1900	

Sumber : Data sekunder yang diolah

*Net Working Capital to Total Asset* PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan turun selama tahun 1992 sampai tahun 1994. *Net working capital to total asset* yang dicapai pada tahun 1994 hanya sebesar 0,6251%. Hal ini disebabkan adanya penurunan modal kerja yang digunakan untuk menambah aktiva tetap. Sedangkan angka rasio tertinggi diraih pada tahun 1998 yaitu sebesar 35,62 %. Tingginya nilai rasio ini disebabkan meskipun terjadi penambahan aktiva tetap namun

juga peningkatan pada pos aktiva lancar. Besarnya modal kerja bersih pada tahun 1998 merupakan modal kerja tertinggi yang diraih selama 1992-1999.

Nilai  $t$  hitung berada di daerah penolakan  $H_0$  karena  $t$  hitung = - 4,1833 lebih besar dari batas atas nilai kritis  $t = - 1,9432$ . Dengan demikian kita menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$  yang menyatakan bahwa *net working capital to total asset* sebelum lebih rendah daripada *net working capital to total asset* sesudah merger.

Nilai probabilitas = 0,002896 menunjukkan kemungkinan terjadinya kesalahan atas penolakan  $H_0$  adalah sebesar 0,002896. Ini berarti terdapat perbedaan sangat nyata atau rata-rata *net working capital to total asset* sebelum merger lebih rendah daripada rata-rata *net working capital to total asset* sesudah merger. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : rendahnya modal kerja netto PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan pada periode sebelum melakukan merger disebabkan adanya kenaikan jumlah hutang lancar dari tahun 1992 sampai 1995. Disamping itu juga terjadi penurunan modal kerja, diantaranya digunakan untuk pengembangan aktiva tetap. Pada periode empat tahun kedua (sesudah merger) terjadi peningkatan jumlah aktiva lancar yang cukup tajam sehingga modal kerja menjadi naik.

#### 4.3. Rasio Aktivitas (Efisiensi)

Rasio ini mengukur seberapa besar efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber-sumber dananya. Rasio perputaran persediaan (*inventory turnover*), rasio perputaran total aktiva (*total asset turnover*) dan periode pengumpulan piutang (*collection period*) digunakan dalam penilaian efektivitas dan efisiensi PT.

Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan. Rasio perputaran persediaan diperlukan untuk menilai tingkat likuiditas persediaan yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi tingkat perputaran persediaan maka semakin tinggi pula likuiditas persediaan. Sebaliknya perputaran persediaan yang relatif rendah mengindikasikan adanya persediaan barang yang berlebihan, mengalami kelambatan dalam peredarannya atau mengalami keausan. Tinggi rendahnya perputaran persediaan yang optimal sangat bervariasi, tergantung pada jenis usaha, kebijakan pembelian dan persediaan serta metode produksi yang digunakan. Untuk menghitung *inventory turnover* perusahaan dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Perputaran Persediaan} = \frac{\text{harga pokok penjualan}}{\text{persediaan rata-rata}} \quad (\dots\text{kali})$$

Hasil perhitungan rasio perputaran persediaan PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan tahun 1992-1999 terdapat pada tabel 4.1.4. Berdasarkan tabel tersebut, peningkatan tajam perputaran persediaan dari 4,7526 kali menjadi 9,4947 kali terjadi pada tahun 1996-1997. Kenaikan harga pokok penjualan selama tahun 1996-1997 yang disebabkan oleh adanya kenaikan biaya produksi antara lain biaya panen dan pengolahan serta penggunaan sarana produksi dengan kandungan bahan impor yang tinggi, mengakibatkan naiknya perputaran persediaan.

Secara keseluruhan rata-rata rasio perputaran persediaan PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan selama tahun 1992-1995 adalah sebesar 7,4591 kali, sedang untuk empat tahun kedua (1996 - 1999) rata - rata

perputaran persediaan adalah sebesar 6,7256 kali.

**Tabel 4.5.** Perhitungan *Inventory Turn Over* PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan sebelum dan sesudah merger (dalam Rupiah)

Tahun	Harga Pokok Penjualan	Persediaan Rata2	I T O	Naik/(turun)
1992	54.571.210.974	8.743.247.603	6,2415	
1993	59.882.742.730	8.217.643.011	7,2871	naik
1994	68.872.467.978	8.421.680.893	8,1780	naik
1995	75.904.467.748	9.336.502.100	8,1299	(turun)
		rata-rata	7,4591	
1996	42.158.747.786	8.889.450.893	4,7526	(turun)
1997	75.364.759.094	7.937.527.358	9,4947	naik
1998	56.671.408.732	10.073.641.000	5,6257	(turun)
1999	92.245.925.687	13.122.618.000	7,0295	naik
		rata-rata	6,7256	

Sumber : Data sekunder yang diolah

Nilai  $t$  hitung berada di daerah penerimaan  $H_0$  karena  $t$  hitung = 0,6487 lebih kecil dari batas atas nilai kritis  $t = 1,9432$ . Dengan demikian kita menolak  $H_1$  dan menerima  $H_0$  yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan *inventory turn over* sebelum dan sesudah merger.

Nilai probabilitas = 0,2703 menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan pada tingkat signifikansi yang telah ditentukan ( $\alpha$ ) = 0,05. Dengan demikian perbedaan sebesar 0,2330 dapat diabaikan. Atau dengan kata lain rata-rata *inventory turnover* sebelum merger tidak berbeda dengan rata-rata *inventory turnover* sesudah merger.

*Total asset turnover* mengukur efektivitas seluruh aktiva perusahaan yang digunakan untuk menunjang kegiatan penjualan. *Asset* atau aktiva yang dimiliki perusahaan antara lain mencakup kas, piutang, persediaan serta aktiva tetap berupa bangunan dan mesin-mesin. Semakin tinggi nilai *total asset turnover* menjadi semakin baik karena berarti akan semakin efisien seluruh aktiva yang digunakan dalam kegiatan penjualan dan menciptakan laba.

Seberapa besar efektivitas total aktiva perusahaan dapat dihitung dengan:

$$\text{Rasio perputaran total aktiva} = \frac{\text{penjualan bersih}}{\text{total aktiva rata-rata}} \times 100\%$$

Berikut ini disajikan tabel hasil perhitungan rasio perputaran aktiva tetap PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan selama tahun 1992-1999.

**Tabel 4.6. Perhitungan *Total Asset Turnover* PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan sebelum dan sesudah merger (dalam Rupiah)**

Tahun	Penjualan Bersih	Total Aktiva Rata2	Total Asset Turnover	Naik/(turun)
1992	72.566.414.834	140.137.272.650	0,5178	
1993	76.583.519.708	140.022.522.740	0,5469	naik
1994	96.624.133.054	147.689.969.680	0,6533	naik
1995	121.040.507.847	165.737.612.552	0,7303	naik
		rata-rata	0,6121	
1996	63.097.468.579	152.946.770.787	0,4125	(turun)
1997	75.714.032.159	130.410.581.213	0,5806	naik
1998	171.751.666.594	179.854.909.166	0,9549	naik
1999	115.688.538.972	234.479.738.202	0,4934	(turun)
		rata-rata	0,6104	

Sumber : Data sekunder yang diolah

Periode empat tahun pertama perputaran total aktiva atau *total asset turnover* pada PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan selalu mengalami peningkatan. Angka rasio pada tahun 1998 merupakan perputaran total aktiva tertinggi yang dicapai dari hasil penjualan bersih sebesar Rp. 171.175.666.594. Peningkatan tajam dari penjualan bersih ditunjang dengan kondisi merosotnya nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar serta adanya pengalihan penjualan ekspor lateks pekat menjadi penjualan lokal. Langkah ini diambil karena harga per kg pasaran ekspor apabila dikonversikan ke rupiah menjadi lebih rendah dibandingkan

apabila dijual lokal.

Penurunan perputaran total aktiva yang terjadi pada tahun 1996 dikarenakan penjualan bersih yang diperoleh hanya sebesar Rp. 63.097.468.579. Rendahnya jumlah penjualan bersih ini diakibatkan pengaruh musim kemarau yang berkepanjangan yang menyebabkan menurunnya produksi dan produktivitas seluruh komoditas.

Secara keseluruhan rata-rata perputaran total aktiva selama tahun 1992-1995 adalah sebesar 0,6121 kali yang berarti setiap Rp. 1,00 aktiva menghasilkan Rp. 0,6121 penjualan bersih. Untuk empat tahun kedua (1996-1999) rata-rata perputaran total aktiva adalah sebesar 0,6104 kali.

Nilai  $t$  hitung berada di daerah penerimaan  $H_0$  karena  $t$  hitung = 0,0133 lebih kecil dari batas atas nilai kritis  $t = 1,9432$ . Dengan demikian kita menolak  $H_1$  dan menerima  $H_0$  yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan *total asset turnover* sebelum dan sesudah merger.

Nilai probabilitas = 0,4949 menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan pada tingkat signifikansi yang telah ditentukan ( $\alpha$ ) = 0,05. Dengan demikian perbedaan sebesar 0,4949 dapat diabaikan. Atau dengan kata lain rata-rata *total asset turnover* sebelum merger tidak berbeda dengan rata-rata *total asset turnover* sesudah merger.

*Collection Period* digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat likuiditas aktiva lancar yang berbentuk piutang jangka pendek. Rasio ini menunjukkan berapa lama waktu yang diperlukan sejak perusahaan melakukan penjualan, sampai dengan menerima pembayaran tunai (kas).

Terlalu tingginya periode pengumpulan piutang artinya kebijakan kredit dari perusahaan terlalu liberal atau bebas, sehingga mengakibatkan timbulnya *bad-debt* dan investasi dalam piutang menjadi terlalu besar dan menyebabkan keuntungan akan menurun. Sebaliknya, periode pengumpulan piutang yang terlalu pendek berarti kebijakan kredit yang terlalu ketat dan besar kemungkinan perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan.

$$\text{Periode Pengumpulan Piutang} = \frac{\text{piutang}}{\text{penjualan bersih}} \times 365 \text{ (...hari)}$$

Berdasarkan tabel 4.1.6, pada tahun 1995-1996 terlihat peningkatan *collection period* menjadi 38 hari. Kenaikan ini disebabkan karena penjualan bersih yang diperoleh pada tahun tersebut hanya sebesar Rp. 63.07.468.579, meskipun jumlah aktiva lancar yang diinvestasikan dalam bentuk piutang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hasil penjualan bersih pada tahun tersebut merupakan angka penjualan terendah selama tahun 1992-1999. Dengan meningkatnya rasio ini berarti menurunnya tingkat likuiditas perusahaan yang berbentuk piutang jangka pendek.

**Tabel 4.7. Perhitungan *Collection Period* PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan sebelum dan sesudah merger (dalam Rupiah)**

Tahun	Piutang	Penjualan Bersih	<i>Collection Period</i>	Naik/(turun)
1992	6.372.508.688	72.566.414.834	32,0529	
1993	5.833.025.360	76.583.519.708	27,8004	(turun)
1994	9.513.956.092	96.624.133.054	35,9392	naik
1995	7.507.639.034	121.040.507.847	22,6394	(turun)
		rata-rata	29,6079	
1996	6.705.811.568	63.097.468.579	38,7911	naik
1997	6.894.165.034	75.714.032.159	33,2352	(turun)
1998	8.918.766.003	171.751.666.594	18,9538	(turun)
1999	4.852.730.161	115.688.538.972	15,3105	(turun)
		rata-rata	26,5726	



Secara keseluruhan rata-rata periode pengumpulan selama tahun 1992-1995 adalah sebesar 29,6079 hari atau menjadi 30 hari. Untuk empat tahun kedua (1996-1999) rata-rata periode pengumpulan adalah sebesar 26,5726 hari atau 27 hari.

Nilai  $t$  hitung berada di daerah penerimaan  $H_0$  karena  $t$  hitung = 0,4817 lebih kecil dari batas atas nilai kritis  $t = 1,9432$ . Dengan demikian kita menolak  $H_1$  dan menerima  $H_0$  yang menyatakan bahwa terdapat tidak ada perbedaan *collection period* sebelum dan sesudah merger.

Nilai probabilitas = 0,3235 menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan pada tingkat signifikansi yang telah ditentukan ( $\alpha$ ) = 0,05. Dengan demikian perbedaan sebesar 0,3250 dapat diabaikan. Atau dengan kata lain rata-rata *collection period* sebelum merger tidak berbeda dengan rata-rata *collection period* sesudah merger.

#### 4.4. Rasio Keuntungan (Profitabilitas)

Rasio ini ditujukan untuk menilai seberapa bagus tingkat laba suatu perusahaan. Rasio profitabilitas yang digunakan terdiri atas *Return on Equity* (ROE), *Return On Asset* (ROA), dan *Net Profit Margin*.

*Return On Equity* atau *Return on Net Worth* mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang tersedia bagi para pemegang saham. Rasio ini dipengaruhi oleh besar kecilnya hutang perusahaan, apabila proporsi hutang semakin besar maka rasio ini juga akan semakin besar. Pengembalian ekuitas yang tinggi seringkali merefleksikan penerimaan perusahaan atas kesempatan investasi yang kuat dan manajemen biaya yang efektif.

Rasio pengembalian ekuitas diperoleh dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan ekuitas yang diinvestasikan pemegang saham pada perusahaan. Rumus *Return On Equity* (ROE) :

$$\text{ROE} = \frac{\text{laba bersih setelah pajak}}{\text{ekuitas pemegang saham}} \times 100\%$$

Berikut ini disajikan tabel hasil perhitungan *return on equity* PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan selama tahun 1992-1999.

**Tabel 4.8. : Perhitungan *Return On Equity* PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan sebelum dan sesudah merger (dalam Rupiah)**

Tahun	Laba Bersih stl Pajak	Ekuitas	ROE	Naik/(turun)
1992	1.667.342.658	103.582.198.803	1,6097	
1993	189.019.200	104.329.422.343	0,1812	(turun)
1994	3.095.775.613	107.891.223.759	2,8693	naik
1995	15.785.812.873	126.420.201.538	12,4868	naik
		rata-rata	4,3612	
1996	10.927.621.512	103.566.608.039	10,5513	(turun)
1997	12.987.712.669	116.569.445.447	11,1416	naik
1998	65.530.084.852	182.099.530.299	35,9859	naik
1999	21.927.284.580	186.695.327.775	11,7449	(turun)
		rata-rata	17,3559	

Sumber : Data sekunder yang diolah

Berdasarkan tabel 4. . . , *return on equity* (ROE) PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan pada periode empat tahun pertama terlihat meningkat kecuali pada tahun 1992-1993. Penurunan pada tahun 1993 disebabkan laba bersih yang dihasilkan hanya sebesar Rp. 189.019.200.

Untuk periode sesudah merger hasil pengembalian laba meningkat pada tahun 1998 yaitu sebesar 35,9859 %. Kenaikan tersebut dikarenakan keuntungan

bersih mencapai Rp. 65.530.084.852 sebagai akibat melemahnya nilai rupiah terhadap dolar yang terjadi sejak pertengahan 1997

Secara keseluruhan rata-rata *return on equity* selama tahun 1992-1995 adalah sebesar 4,3162 % yang berarti setiap Rp. 1,00 modal kerja menghasilkan laba bersih setelah pajak sebesar Rp. 0,0431. Untuk empat tahun kedua (1996-1999) rata-rata *return on equity* adalah sebesar 17,3559 %.

Nilai t hitung berada di daerah penerimaan  $H_0$  karena t hitung = - 1,9151 lebih kecil dari batas atas nilai kritis  $t = - 1,9432$ . Dengan demikian kita menolak  $H_1$  dan menerima  $H_0$  yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan *return on equity* sebelum dan sesudah merger.

Nilai probabilitas = 0,0520 menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan pada tingkat signifikansi yang telah ditentukan ( $\alpha$ ) = 0,05. Dengan demikian perbedaan sebesar 0,0520 dapat diabaikan. Atau dengan kata lain rata-rata *return on equity* sebelum merger tidak berbeda dengan rata-rata *return on equity* sesudah merger. Namun pada tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) = 0,10 dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan nyata atau rata-rata *return on equity* sebelum merger lebih rendah daripada rata-rata *return on equity* sesudah merger.

Dengan adanya penurunan jumlah kewajiban terutama hutang jangka panjang pada periode setelah merger menyebabkan beban bunga yang harus ditanggung menjadi berkurang. Dengan berkurangnya beban pokok maka laba bersih yang diperoleh menjadi tinggi sehingga selama periode tersebut tingkat pengembalian laba bersih kepada para pemegang saham cukup tinggi.

*Return On Asset (ROA)* merupakan rasio yang terpenting diantara rasio rentabilitas yang ada. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Semakin tinggi *return on asset* -nya berarti akan semakin baik, karena tingkat pengembalian akan semakin besar.

Untuk mengetahui ROA dapat dicari dengan jalan membagi laba bersih setelah pajak dengan total aktiva rata-rata, atau :

$$ROA = \frac{\text{laba bersih setelah pajak}}{\text{total aktiva rata-rata}} \times 100\%$$

Berikut ini disajikan tabel hasil perhitungan *return on asset* PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan selama tahun 1992-1999.

**Tabel 4.9.** Perhitungan *Return On Asset* PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan sebelum dan sesudah merger

Tahun	Laba Bersih sll Pajak	Total Aktiva rata-rata	ROA (%)	Naik/(turun)
1992	1.667.342.658	140.137.272.650	1,1898	
1993	189.019.200	140.022.522.740	0,1350	(turun)
1994	3.095.775.613	147.889.969.680	2,0933	naik
1995	15.785.812.873	165.737.612.552	9,5246	naik
		rata-rata	3,2357	
1996	10.927.621.512	152.946.770.787	7,1447	(turun)
1997	12.987.712.669	130.410.581.213	9,9590	naik
1998	65.530.084.852	179.354.909.166	36,4350	naik
1999	21.927.284.580	234.479.738.202	9,3515	(turun)
		rata-rata	15,7226	

Sumber : Data sekunder yang diolah

Pada empat tahun pertama tingkat pengembalian investasi atau *return on asset* perusahaan selalu meningkat. Penurunan hanya terjadi selama tahun 1992-

1993 sebesar 1,0548 % sehingga *return on asset*-nya menjadi 0,1350 %. Faktor penyebabnya adalah laba bersih yang dihasilkan hanya Rp. 189.019.200.

Pada periode sesudah melakukan merger, peningkatan rasio terjadi pada tahun 1998 dimana keuntungan bersih meningkat tajam yakni mencapai Rp. 65.530.084.852. Tingginya laba diikuti dengan kenaikan total aktiva rata-rata sebesar Rp. 49.444.327.953 menyebabkan ROA-nya naik menjadi 36,4350 %.

Secara keseluruhan rata-rata *return on asset* selama tahun 1992-1995 adalah sebesar 3,2357 % yang berarti setiap Rp. 1,00 yang diinvestasikan dalam aktiva akan memberikan pengembalian sebesar Rp. 0,0326 setelah dikurangi pajak per tahun. Untuk empat tahun kedua (1996-1999) rata-rata *return on asset* adalah sebesar 15,7226 %.

Nilai  $t$  hitung berada di daerah penerimaan  $H_0$  karena  $t$  hitung = - 1,7219 lebih kecil dari batas atas nilai kritis  $t = - 1,9432$ . Dengan demikian kita menolak  $H_1$  dan menerima  $H_0$  yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan *return on asset* sebelum dan sesudah merger.

Nilai probabilitas = 0,0679 menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan pada tingkat signifikansi yang telah ditentukan ( $\alpha$ ) = 0,05. Dengan demikian perbedaan sebesar 0,0679 dapat diabaikan.

Atau dengan kata lain rata-rata *return on asset* sebelum merger tidak berbeda dengan rata-rata *return on asset* sesudah merger. Namun pada tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) = 0,10 dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan nyata atau rata-rata *return on asset* sebelum merger lebih rendah daripada rata-rata *return on asset* sesudah merger.

Sejak pertengahan tahun 1997 merupakan awal dari krisis moneter yang terjadi di Indonesia dengan ditandai terdepresiasinya nilai rupiah terhadap dolar. Di sektor perkebunan, karena penjualan komoditi berorientasi ekspor maka kondisi tersebut justru menguntungkan sebagai akibat adanya perbedaan kurs. Rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar adalah Rp 8.414/US\$. Dengan demikian selama periode tersebut memberikan *return on asset*-nya lebih besar dibanding tahun-tahun sebelum melakukan merger.

Rasio marjin laba bersih merupakan ukuran keuntungan dari penjualan perusahaan setelah menghitung seluruh biaya dan pajak penghasilan. Besarnya marjin laba bersih menunjukkan besarnya perolehan dana yang berasal dari hasil usaha (yaitu berupa laba) yang berhasil dikumpulkan oleh perusahaan dalam kurun waktu satu tahun, selanjutnya dapat dipergunakan untuk dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau ditanamkan kembali di dalam perusahaan untuk memperbesar modal perusahaan.

$$\text{Rasio marjin laba bersih} = \frac{\text{laba bersih setelah pajak}}{\text{penjualan bersih}} \times 100\%$$

Dari tabel 4.4.3. menunjukkan bahwa marjin laba bersih mengalami penurunan dari 2,2976 % pada tahun 1992 menjadi 0,2468 % pada tahun 1993. Hal ini disebabkan kenaikan penjualan bersih selama tahun 1993 ternyata tidak memberikan peningkatan keuntungan. Laba bersih yang diperoleh hanya sebesar Rp. 189.019.200. Selanjutnya pada periode sesudah melakukan merger terjadi peningkatan marjin laba bersih, terutama pada tahun 1998 dari hasil penjualan bersih sebesar Rp. 171.751.666.594 menghasilkan laba bersih Rp.

65.530.084.852. Angka tersebut merupakan angka penjualan serta keuntungan tertinggi yang dicapai selama periode 1996-1999.

**Tabel 4.10. Perhitungan *Net Profit Margin* PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan sebelum dan sesudah merger**

Tahun	Laba Bersih stl Pajak	Penjualan Bersih	NPM (%)	Naik/(turun)
1992	1.667.342.658	72.566.414.834	2,2976	
1993	189.019.200	76.583.519.708	0,2468	(turun)
1994	3.095.775.613	96.624.133.054	3,2039	naik
1995	15.785.812.873	121.040.507.847	13,0418	naik
		rata-rata	4,6975	-
1996	10.927.621.512	63.097.468.579	17,3186	naik
1997	12.987.712.669	75.714.032.159	17,1536	(turun)
1998	65.530.084.852	171.751.666.594	38,1539	naik
1999	21.927.284.580	115.688.538.972	18,9537	(turun)
		rata-rata	22,8950	

Sumber : Data sekunder yang diolah

Secara keseluruhan rata-rata marjin laba bersih selama tahun 1992-1995 adalah sebesar 4,6975 % yang berarti setiap Rp. 1,00 dari penjualan menghasilkan laba bersih setelah pajak sebesar Rp. 0,04697. Untuk empat tahun kedua (1996-1999) rata-rata marjin laba bersih adalah sebesar 22,8949 %.

Nilai  $t$  hitung berada di daerah penolakan  $H_0$  karena  $t$  hitung = - 3,1138 lebih besar dari batas atas nilai kritis  $t = - 1,9432$ . Dengan demikian kita menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$  yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan *net profit margin* sebelum dan sesudah merger.

Nilai probabilitas = 0,0104 menunjukkan kemungkinan terjadinya kesalahan atas penolakan  $H_0$  adalah sebesar 1,04 %. Ini berarti terdapat perbedaan sangat nyata atau rata-rata *net profit margin* sebelum merger lebih rendah daripada rata-rata *net profit margin* sesudah merger. .

Peningkatan penjualan bersih pada tahun 1997-1998 (periode sesudah melakukan merger) dikarenakan adanya pengalihan penjualan ekspor untuk komoditi lateks pekat menjadi penjualan lokal. Langkah ini diambil karena harga per kg pasaran ekspor apabila dikonversikan ke rupiah menjadi lebih rendah dibandingkan apabila dijual lokal. Dengan meningkatnya penjualan bersih selama periode tersebut memberikan margin laba bersih cukup tinggi.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil analisis terhadap data keuangan PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan ditinjau dari aspek likuiditas, leverage, rentabilitas serta aktivitas (efisiensi) sehingga kesimpulan serta saran-saran yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

#### 5.1. Kesimpulan

1. Tingkat likuiditas PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan pada periode sesudah merger (1996-1999) lebih baik daripada periode sebelum melakukan merger (1992-1995). Dengan adanya merger, meskipun terjadi penambahan modal kerja namun aktiva lancar yang tersedia dalam kas perusahaan (benar-benar likuid) belum mampu menjamin kewajiban lancar sehingga dapat dikatakan PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan kurang likuid.
2. Rasio leverage PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan pada periode sesudah merger lebih rendah pada periode sesudah merger. Selama tahun 1996-1999, proporsi jumlah hutang jangka panjang terhadap struktur permodalan menjadi turun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa untuk likuidasi, total kewajiban masih dapat terjamin atau dapat dipenuhi. Terlebih apabila dilihat dari modal sendiri yang jumlahnya masih lebih besar daripada total hutangnya.

3. Selama tahun 1996-1999, rentabilitas PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan mengalami peningkatan. Peningkatan penjualan bersih yang terjadi lebih banyak dikarenakan kondisi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar pada saat itu. Harga jual rata-rata per unit komoditi terjadi kenaikan berkisar 115%-384% dari Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP).
4. Peningkatan efisiensi serta efektifitas PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Divisi Tanaman Tahunan melalui merger, sesuai dengan tujuan penggabungan itu sendiri terlihat belum terwujud. Persediaan merupakan elemen penting dalam usaha perusahaan untuk memperoleh tingkat penjualan yang diinginkan. Oleh karena itu pihak manajemen perlu menetapkan tingkat persediaan serta modal kerja yang optimal sehingga tercapai peningkatan efisiensi dalam kegiatan operasional maupun pencapaian skala ekonomis.

## 5.2 Saran-saran

1. Untuk menciptakan efisiensi serta efektifitas perusahaan, sebaiknya manajemen perusahaan mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut :
  - Menekan biaya produksi seoptimal mungkin dengan jalan menekan dan mengurangi penggunaan sarana produksi yang memakai kandungan bahan impor serta meningkatkan efisiensi operasional pabrik.
  - Melakukan langkah *cost reduction* di segala bidang termasuk penataan dibidang SDM serta langkah efisiensi penekanan biaya yang tidak langsung terkait dengan peningkatan produksi.
  - Investasi hanya dilaksanakan pada hal yang mendapat prioritas untuk

meningkatkan produksi dan produktivitas seluruh komoditi.

- Agar produk yang dihasilkan mampu bersaing dengan produk luar maka kualitas produk harus benar-benar prima dan untuk membuat mutu menjadi prima berarti seleksi mutu menjadi ketat dan konsekuensinya mutu lokal menjadi naik.
2. Dalam mengambil kebijakan merger, sebaiknya pemerintah melakukan penggabungan usaha antara perusahaan yang sejenis bidang usahanya sehingga dengan demikian budaya kerja yang baik tetap dapat dipertahankan dan dapat menciptakan suatu sinergi dalam perusahaan.

## Daftar Pustaka

- Agus Sabardi, 1994. *Manajemen Keuangan*. Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN. Yogyakarta.
- Agus Sartono. 1998. *Manajemen Keuangan*. BPFE. Yogyakarta.
- Ang, Robbert, 1997. *Buku Pintar Pasar Modal Indonesia (The Intelligent Guide to Indonesian Capital Market)*. Mediasoft Indonesia.
- Bambang Riyanto, 1995. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. BPFE. Yogyakarta.
- Beams, Floyd A. 1998. *Akuntansi Keuangan Lanjutan di Indonesia*. Alih bahasa oleh Amir Abadi Jusuf. Salemba Empat. Jakarta.
- Consuelo G. Sevilla, et.al. 1993. *Pengantar Metode Penelitian*. Alih bahasa oleh Alimuddin Tuwu. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Direktorat Perusahaan Pertanian dan Kehutanan Departemen Keuangan RI, 1995. *Konsolidasi BUMN Perkebunan Departemen Pertanian*. Jakarta.
- Fruhan, William E, et. al., 1992. *Case Problem in Finance*. Tenth Edition, Graduate School of Business Administration, Harvard University.
- Gaughan, Patrick A, 1996. *Mergers, Acquisitions and Corporate Restructurings*. John Wiley & Sons, Inc.
- Hamanto, 1987. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Pertama. BPFE Yogyakarta.
- Hiro Tugiman, 1996. *Perkembangan dan Tantangan Internal Auditing di Indonesia*. PT. Karyaputri Wardhani. Bandung.
- Horne, James C. Van. 1989. *Financial Management and Policy*. Alih bahasa oleh Heru Sutojo. Salemba Empat. Edisi Kesembilan. Jakarta
- Indra Isnawan, 1998. *Aspek Krusial di Balik Privatisasi BUMN*. Manajemen No. 121 September 1998.
- I. G. Rai Widjaja, 1996. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas. Khusus Pemahaman atas UU No. 1 Tahun 1995*. Megapoin Divisi Kesaint Blanc.
- Mas'ud Machfoedz, 1995. *Undang-Undang Perseroan Minoritas dari Praktek Bisnis Pasar Modal yang Tidak Sehat*. Seminar Nasional 30 September 1995. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

- Mustaruddin, 1992. "Prediksi Perkembangan Tingkat Kesehatan BUMN Perkebunan Aneka Tanaman di Indonesia". *Tesis* Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta (Tidak Dipublikasikan).
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 4. "Laporan Keuangan Konsolidasi". Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta (1994).
- Purba A. Zen Umar, 1995. *Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Serta Perlindungan Terhadap Pihak ketiga*. Bussiness New. Jakarta.
- Rilda Murniati, 1998. "Alasan dan Tujuan serta Akibat Hukum Peleburan Perseroan (Studi Kasus Peleburan PTP X dan PTP XXXI)". *Tesis* Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta (Tidak Dipublikasikan).
- Siegel, Sidney, 1997. *Statistik Non Parametrik*. PT. Gramedia. Jakarta.
- Suad Husnan, 1992. *Manajemen Keuangan, Teori dan Penerapannya*. BPFE Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 1993. *Pembelanjaan Perusahaan (Dasar-Dasar Manajemen Keuangan)*. Liberty. Yogyakarta.
- Syakhroza, Akhmad. *Pola Penyehatan dan Tolok Ukur Kinerja BUMN*. Usahawan No. 04 Th XXVII April 1998.
- Warta Pertanian, 1994. *Konsolidasi BUMN Perkebunan*. Jakarta
- Warta Pertanian, 1996. *Urgensi Membangun Citra PT. Perkebunan Nusantara*. Jakarta
- Weston, J.F; Chung, Kwang S; Hoag, Susan E; 1990. *Mergers, Restructuring and Corporate Control*. Prentice Hall International Inc.
- Weston, J.F & Thomas E. Copeland. 1997. *Financial Management*. Alih bahasa oleh A. Jaka Wasana dan Kibrandoko. Binarupa Aksara. Edisi Kesembilan. Jakarta